

MORALITAS DAN HUKUM KEPERDATAAN ISLAM DI ERA DISRUPTIF:

PENDEKATAN *EVIDENCE BASED POLICY* (EBP)

Pidato Pengukuhan Guru Besar

Di bidang Ilmu Hukum Perdata Islam

Pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya



Disampaikan Oleh:

Prof. Dr. Ahmad Dakhoir, SHI, MHI

NIP. 198207072006041003

DISAMPAIKAN DALAM PENGUKUHAN GURU BESAR



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PALANGKA RAYA
KALIMANTAN TENGAH – INDONESIA
<https://iain-palangkaraya.ac.id>

**MORALITAS DAN HUKUM KEPERDATAAN ISLAM
DI ERA DISRUPTIF;
PENDEKATAN *EVIDENCE BASED POLICY* (EBP)**

**Pidato Pengukuhan Guru Besar
Di bidang Ilmu Hukum Perdata Islam
Pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya**



**Disampaikan Oleh:
Prof. Dr. Ahmad Dakhoir, SHI, MHI
NIP. 198207072006041003**

DISAMPAIKAN DALAM PENGUKUHAN GURU BESAR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALANGKA RAYA
7 SEPTEMBER 2022

Kalam Hikmah

*Ilmu pengetahuan tanpa agama akan lumpuh,
Agama tanpa ilmu pengetahuan akan buta.*

(Prof. Albert Einstein)

*Berbahagialah orang yang tahu,
dan tahu bahwa dirinya tidak tahu.*

(Prof. Djodiguno)

*Bermimpilah, karena berani bermimpi, sudah
separo keberhasilan, dan sisanya tuntaskan
dengan bekerja dengan penuh keyaqinan.*

(Prof. Nur Syam)

*Menggiring manusia dalam beribadah, akan
menjadi besar, tapi menggiring manusia untuk
berfikir, akan menjadi jauh lebih besar dan luas lagi.*

(Prof. Ibnu Elmi)



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Muqaddimah

Yang terhormat:

- Pimpinan dan Anggota Senat IAIN Palangka Raya;
- Gubernur Kalimantan Tengah H Sugianto Sabran, Para Bupati dan Walikota Forum Komunikasi dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Pimpinan IAIN Palangka Raya, Pimpinan Fakultas, Jurusan, Program Studi, Lembaga, dan segenap Civitas Akademika IAIN Palangka Raya;
- Para Guru Besar yang Sangat Terpelajar;
- Para undangan dan hadirin yang saya muliakan.

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. *Alhamdulillah Rabbil 'Alamin*, atas rahmat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, kita semua diberi

kesempatan untuk hadir pada acara pengukuhan jabatan akademik tertinggi didalam sebuah perguruan tinggi yaitu pengukuhan Guru Besar di IAIN Palangka Raya dalam keadaan yang sangat berbahagia. Sholawat dan salam mari kita sampaikan dengan penuh kecintaan kepada Habibuna Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan *Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad*.

Perkenankanlah saya untuk menyampaikan pidato pengukuhan sebagai Profesor dalam bidang Hukum Perdata Islam, dengan judul: **Moralitas dan Hukum Keperdataan Islam di Era Disruptif: Pendekatan *Evidence Based Policy* (EBP).**

***Current Issue* Hukum Keperdataan Islam**

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Dinamika hukum keperdataan di dunia internasional terus bergejolak dan mengalami banyak perubahan. Dinamika itu dipengaruhi perubahan sendi dan gaya kehidupan masyarakat industrial dan masyarakat digital.¹ "Penumpang-penumpang" lama

¹ Dufva, Tomi, and Mikko Dufva. "Grasping the future of the digital society." *Futures* 107 (2019): 17-28.

(hukum perdata) seperti di bidang hukum orang, hukum kekeluargaan, hukum harta, hukum waris,² serta (hukum perdata Islam) hukum perkawinan, perceraian, rujuk, waris, wasiat, pengelolaan zakat, hibah, ekonomi syariah, industry keuangan, penyelenggaraan ibadah haji, juga mengalami perubahan drastis, baik kehadirannya telah memberikan solusi maupun menjadi pemicu masalah.³ Dinamika hukum keperdataan tersebut, ada yang dapat dikendalikan, namun ada pula yang tidak dapat dikendalikan lagi.⁴

Hukum perdata Islam di bidang perkawinan, ada banyak masalah hukum yang menjadi trending yaitu tingginya perkawinan anak dan perdebatan usia perkawinan, tingginya perceraian, perkawinan beda agama,⁵ dan reseksi seksual.⁶ Tingginya perkawinan

² Dainow, Joseph. "The civil law and the common law: some points of comparison." *Am. J. Comp. L.* 15 (1966): 419.

³ Spires, Anthony J. "Regulation as political control: China's first charity law and its implications for civil society." *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly* 49.3 (2020): 571-588.

⁴ Berlemann, Michael, and Robin Christmann. "Disposition time and the utilization of prior judicial decisions: Evidence from a civil law country." *International Review of Law and Economics* 62 (2020): 105887.

⁵ Aini, Noryamin, Ariane Utomo, and Peter McDonald. "Interreligious marriage in Indonesia." *Journal of Religion and*

anak di Indonesia tahun 2021 bertengger sebagai Negara dengan perkawinan anak tertinggi ke 8 dunia, dan nomor 2 di ASEAN.⁷ Demikian dengan perceraian di Indonesia yang masih menjadi Negara dengan rekor tertinggi perceraian di Asia dan Afrika dengan jumlah 35 % dari jumlah perkawinan setiap tahun, yaitu 2 juta perkawinan⁸. Hal ini meningkat dari 291.677 kasus meningkat 53,50% menjadi 447.743 kasus pada 2021. Dan hingga agustus tahun 2022 sekarang ini, jumlah perceraian total sebanyak 3.951.768 perkara yang telah berstatus *in kracht van gewijsde*.⁹ Alih-alih

Demography 6.1 (2019): 189-214. Lihat pula Cammack, Mark. "Legal aspects of Muslim-non-Muslim marriage in Indonesia." *Muslim-non-Muslim marriage: Political and cultural contestations in Southeast Asia* (2009): 102-138. Lihat pula Nurcholish, Ahmad. *Interfaith marriage in the constitution and the Islamic law dynamics in Indonesia*. Universitas Islam Indonesia, 2015.

⁶ Nisa, Eva F. "The bureaucratization of Muslim marriage in Indonesia." *Journal of Law and Religion* 33.2 (2018): 291-309.

⁷ Grijns, Mies, and Hoko Horii. "Child marriage in a village in West Java (Indonesia): Compromises between legal obligations and religious concerns." *Asian Journal of Law and Society* 5.2 (2018): 453-466.

⁸ O'shaughnessy, Kate. *Gender, state and social power in contemporary Indonesia: Divorce and marriage law*. Routledge, 2009.

⁹ Widyastari, Dyah Anantalia, et al. "Marital Dissolution in Postmodern Java, Indonesia: Does Early Marriage Increase the Likelihood to Divorce?." *Journal of Divorce & Remarriage* 61.8 (2020): 556-573.

membicarakan tingginya perkawinan anak dan cerai, jagat Indonesia baru saja dihebohkan media dengan perkawinan beda agama,¹⁰ pernikahan seseorang dengan kambing,¹¹ perkawinan pemalsuan jenis kelamin, hingga dugaan resesi asmara keluarga atau entah apa namanya, yang berujung pada hilangnya nyawa brigadir J. Semuanya memang belum jelas hukumnya, namun berita-berita itu tampak sedap untuk dianalisa dari sisi hukum keluarga dan perdata islam.

Di bidang harta waris dan harta bersama jumlah kasusnya juga tak menunjukkan turun, tapi turun temurun ke anak cucu. Lihat saja, saya bersama Profesor Dr Ibnu Elmi AS Pelu SH MH, pernah melakukan investigasi secara *realtime* terhadap kasus sengketa harta bersama yang teregistrasi di badilag mahkamah agung sejak tahun 1900 sampai maret tahun 2022. Hasilnya menunjukkan bahwa sengketa

¹⁰ Suhasti, Ermi, Siti Djazimah, and Hartini Hartini. "Polemics on Interfaith Marriage in Indonesia between Rules and Practices." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 56.2 (2018): 367-394. Lihat pula Hedi, Fathol, Abdul Ghofur Anshori, and Harun Harun. "Legal Policy of Interfaith Marriage in Indonesia." *Hasanuddin Law Review* 3.3 (2017): 263-276.

¹¹ TvOne, "Menikah dengan kambing," dalam <https://www.tvonenews.com/daerah/jatim/46216-fakta-menarik-manusia-menikah-dengan-kambing-di-gresik-melibatkan-anggota-dprd-berujung-taubat>. Di akses tanggal 1 juli 2022.

harta bersama terus mengalami peningkatan drastis hingga menyentuh 18.443 kasus.¹² Peningkatan drastis dimulai sejak tahun 2006 hingga saat ini. Suami istri yang bercerai, yang dahulunya saling menyayangi, hari ini harus berhadap-hadapan dan berkonflik lagi dengan obyek yaitu harta bersama.

Di bidang hukum pengelolaan haji, dinamika hukum dalam mengatasi daftar tunggu/antri ibadah haji masih menjadi focus dan keresahan umat islam di Indonesia.¹³ Menurut kompas, daftar tunggu ibadah haji semakin variatif, tergantung kebijakan kuota yang dikeluarkan oleh pemerintah Saudi Arabia setiap tahun. Alhasil, ada yang antri 11 tahun, ada pula yang antri hingga 39 tahun. Apalagi ketika Allah utus sebuah makhluk "halus" (kecil) yang besarnya hanya 500 mikron alias sangat mungil, yang namanya terkenal dengan covid, telah mengubah system pengelolaan ibadah haji. 2 tahun libur ibadah haji, dan muncul

¹² Pelu, Ibnu Elmi AS, and Ahmad Dakhoir. "Marital Property within the Marriage Law: A Debate on Legal Position and Actual Applications." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 59.2 (2021): 287-316.

¹³ Muneeza, Aishath, et al. "A comparative study of hajj fund management institutions in Malaysia, Indonesia and Maldives." *International Journal of Management and Applied Research* 5.3 (2018): 120-134.

kebijakan kuota yang hanya 50%.¹⁴ Dampaknya, antri haji bisa semakin lama lagi, bahkan ada yang menyentuh hampir 1 abad baru bisa berangkat haji. Berhaji berulang-ulang, umrah berulang-ulang, sedikit dan pelan telah membentuk karakter ego spiritual. Ditengah antrian yang begitu panjang, promosi haji menjadi peluang dan berhasil dimanfaatkan dengan sangat baik oleh lembaga jasa keuangan. Norma utama yang menjadi pintu tingginya antrian ibadah haji dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UUH belum berubah hingga saat ini.

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Di bidang hukum pengelolaan zakat, juga masih menghadapi berbagai masalah. Jika dalam ibadah haji, umat islam berlomba-lomba mendaftar meskipun jauh dari kata mampu, maka pada pengamalan ibadah zakat, adalah sebaliknya, berlomba-lomba mendaftar dan siap antri sebagai penerima zakat dan berlomba-lomba untuk tidak antri dalam menyalurkan zakat.¹⁵

¹⁴ Alsharif, Fahad. "Undocumented migrants in Saudi Arabia: COVID-19 and amnesty reforms." *International Migration (Geneva, Switzerland)* 60.1 (2022): 188.

¹⁵ Benthall, Jonathan. "Financial worship: The Quranic injunction to almsgiving." *Journal of the Royal Anthropological Institute* (1999): 27-42.

Dampaknya dimana-mana masih banyak mustahiq permanen.¹⁶ Ibadah zakat sangat bertolak belakang dengan minat dalam pengalaman ibadah haji. Sebuah potret pengamalan keber-agama-an yang unik dan tidak moderat. Belum selesai tentang rendahnya wajib zakat, instrument hukum zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak yang telah legal sejak tahun 2011 pun tak kunjung efektif berlaku.¹⁷ Rendahnya

¹⁶ Pantas, Pribawa. "Zakat Effects on Mustahiq Happiness." *2019 Ahmad Dahlan International Conference Series on Education & Learning, Social Science & Humanities (ADICS-ELSSH 2019)*. Atlantis Press, 2019.

¹⁷ Zakat is one part of the rules of social security in Islam, in a deeper and broader scope, which includes aspects of material and spiritual life. Zakat is also a financial, economic, social, political, moral and religious system at the same time. Zakat as a financial and economic system, because it is a specified property tax. Zakat is a financial source of baitul mall in Islam that is continuous. Zakat as a social system, because it functions to save people from various weaknesses, overcome various disasters and accidents, provide humanitarian assistance, who are helping those who do not have, the strong help the weak. Zakat and tax are the material obligations of a citizen of his country and are a source of state income used to finance state expenses and needs. the position of zakat cannot be replaced by taxation. the problem in Indonesia where the majority of the population is Muslim, in addition to being obligatory zakat they are also burdened with various taxes, so that a middle way can be taken, namely reducing the amount of tax by the amount of zakat that has been paid. Thus a taxpayer can still pay obligations as citizens and continue to fulfill their religious obligations. Dalam Marpaung, Aripin. "Zakat Regulation as a Reduction of Income Tax in Indonesia." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* Vol 3.3 (2020): 2109-2116.

budaya zakat dan problem ketepatan dalam membayar zakat semakin mengalami *distrust* ketika kewenangan lembaga zakat masih tumpang tindih sebagai operator sekaligus regulator. Puncak ibadah zakat yang lazim di maksimalkan di bulan ramadhan dan awal syawwal, justru memposisikan zakat lebih rendah dengan ibadah yang lain. Sehingga tidak heran KH Musthafa Bisri (Gu Mus) pernah menyatakan "saat Idul fitri, ada 4 hal, 3 yang sunnah di dahulukan (yaitu tarawih, takbiran dan sholat idul fitri), 1 yang wajib justru di abaikan yaitu zakat." Kesan ini jauh dari semangat kaidah *ma la yatiimul wajib illa bihi fahuwa wajibun*.¹⁸

Kedudukan zakat yang maha penting namun tidak mendapatkan sentuhan paradigma baru dan reformulasi norma yang bagus, akhirnya telah berdampak terhadap ekonomi ummat. Salah satu akibat kemiskinan adalah terkadang memang tidak terjadi kelaparan, tapi tidak terpenuhinya gizi dimasyarakat sudah pasti dirasakan. Hal ini bisa dilihat dalam realitas, terutama kondisi balita di usia 1000 hari

¹⁸ Imam Jalaluddin Abdurrohman As-Suyuti. Al-Asybah Wan Nadho'ir Lis Suyuthi. Maktabah Nazzar Al-Baz: Mekah, Riyadh, Arab Saudi. 1997. Hal : 125

pertama.¹⁹ Dampaknya adalah balita menjadi kerdil atau dikenal dengan *stunting*. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan bahwa Indonesia menempati peringkat ke 4 dengan kasus *stunting* tertinggi di dunia, dengan jumlah 12 juta balita.²⁰

Zakat yang seharusnya mampu berperan membantu membasmi *stunting*, dapat mereformulasi dan mengkonversi zakat konsumtif dan zakat fitrah harus dirubah lebih moderat yaitu berupa pemberian makanan pokok menjadi zakat konsumtif berbasis gizi.²¹ Demikian dengan keberpihakan ibadah maliyah

¹⁹ Dakhoir, Ahmad, Ibnu Elmi AS Pelu, and Dian Ferricha. "Contextualization of the Use of Zakat in Reducing Stunting: Evidence from Indonesia." *International Journal of Entrepreneurship* 25.2 (2021).

²⁰ Beal, Ty, et al. "A review of child stunting determinants in Indonesia." *Maternal & child nutrition* 14.4 (2018): e12617.

²¹ The prevention of malnutrition and the reduction of stunting through the use of nutrition-based zakat by BAZNAS and Rumah Zakat in Indonesia. The philanthropy displayed by the two zakat institutions is different from the distribution of zakat in general. This paper concludes that decreasing malnutrition such as malnutrition, malnutrition, wasting and stunting, as well as increased malnutrition such as obesity is a form of unequal, unfair and unintegrated distribution of food. The abundant potential of zakat on food, and the contextual use of zakat carried out by BAZNAS and Rumah Zakat on many problematic nutrition targets, have had a micro positive impact on improving nutrition and alleviating stunting, both at the preventive and post-stunting stages. The nutrition-based zakat distribution model is the

zakat ini sebagai instrument fiskal, juga belum mendapatkan prioritas oleh bangsa yang konon merupakan Negara dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia (236 juta jiwa/86%).

Di bidang industri keuangan dan pembiayaan juga masih banyak PR yang harus diselesaikan. Tumbuh-suburnya pinjaman online ilegal, yang berujung pada suburnya "rentenir online"²² yang jauh dari kepastian hukum, dan jauh dari prinsip syariah compliance (kesesuaian syariah) telah berhasil menancap di jari-jemari generasi millennial dan generasi zillennial.²³ Akibatnya generasi yang senang dengan instanisasi, menjadi korban bahkan dengan kepiawaian generasi itu, dapat berbalik menjadi pelaku

beginning of the birth of the nutritional zakat concept in the field of zakat. Dalam Dakhoir, Ahmad, Ibnu Elmi AS Pelu, and Dian Ferricha. "Contextualization of the Use of Zakat in Reducing Stunting: Evidence from Indonesia." *International Journal of Entrepreneurship* 25.2 (2021). Hal. 1.

²² Sitepu, Anwar. "Fenomena Rentenir: Studi Eksploratori di Kabupaten Bekasi dan Sekitarnya." *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* 10.1 (2020): 55-73.

²³ Dakhoir, Ahmad. "Hukum syariah compliance di perbankan syariah." (2017). Lihat pula Grais, Wafik, and Matteo Pellegrini. *Corporate governance and Shariah compliance in institutions offering Islamic financial services*. Vol. 4054. World Bank Publications, 2006.

kejahatan di bidang keuangan.²⁴ Hari ini, pemerintah menutup 1 pinjol, esok berpinjol-pinjol tumbuh dan berkembang biak dengan varian yang baru.²⁵ Masih minimnya pembiayaan berbasis *green banking* dan *blue banking* juga masih menjadi harapan para pencari modal usaha. Ditambah minimnya kebijakan implementasi CSR yang tepat sasaran,²⁶ cukup menjadi argumentasi hukum yang kuat dalam membuat kebijakan yang tepat dan efektif.²⁷

Urgensi EBP dalam Pembuatan Kebijakan

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Akhir-akhir ini, pembuatan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) semakin didorong oleh

²⁴ Cheong, Calvin WH. "Risk, resilience, and Shariah-compliance." *Research in International Business and Finance* 55 (2021): 101313.

²⁵ Dakhoir, Ahmad. "The fatwa authorities of National syariah council of Majelis Ulama Indonesia in supporting The principle if syariah Compliance." *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 22.1 (2019).

²⁶ Dakhoir, Ahmad. "Konstruksi Hukum Pengaturan Tarif Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia." *Arena Hukum* 12.1 (2019): 136-152.

²⁷ Dakhoir, Ahmad. "Al-Qardawi's Thought on Zakat of Stocks in a Modern Industry: an Experience of Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13.2 (2019): 159-168.

pemerintah dan para akademisi.²⁸ Penggunaan istilah evidence-based policy muncul pada pemilihan Tony Blair sebagai Perdana Menteri Inggris,²⁹ dengan keinginan untuk mengeluarkan ideologi dan politik dalam proses kebijakan. Fokus dari evidence-based policy adalah menggambarkan bukti yang berasal dari riset untuk mempengaruhi pembuat kebijakan mengenai apa yang akan dikerjakan dan selanjutnya menghasilkan outcome kebijakan yang lebih baik. di Indonesia pendekatan evidence-based policy muncul sekitar 1990-an. Evidence-based policy mengadvokasi pembuat kebijakan untuk mengambil kebijakan dengan lebih rasional, teliti, dan menggunakan pendekatan sistematis. Hubungan antara ilmu pengetahuan (knowledge), riset (research), dan kebijakan (policy) sesungguhnya sudah menjadi perhatian para pakar selama beberapa dekade, dikenal Annette Boaz dan koleganya yang mulai memperkenalkan pada tahun

²⁸ Pawson, Ray. *Evidence-based policy: a realist perspective*. sage, 2006.

²⁹ Kultsum, Fidyah Faridah, and Erlina Wiyanarti. "Dinamika Inggris Dan Uni Eropa: Integrasi Hingga Brexit." *Factum: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah* 7.2 (2018): 163-174.

1895.³⁰ Evidence-based policy sendiri secara literatur telah mendapat kritikan khususnya mengenai kealamiahannya sebuah proses kebijakan, validitas dari bukti, kecenderungan yang mendukung jenis bukti tertentu, dan potensial untuk berimplikasi pada tidak demokratis. Namun demikian, dalam perkembangannya, evidence-based policy terbukti menjadi sangat penting dalam proses pembuatan kebijakan. Evidence-based policy telah membantu masyarakat untuk memahami sebuah kebijakan karena sangat terinformasikan (well-informed) mengenai keputusan dalam penyusunan kebijakan, program dan proyek, dengan menempatkan data terbaik yang tersedia dari hasil riset sebagai jantung dari pembangunan dan implementasi kebijakan. Evidence-based policy juga membuat jelas apa yang diketahui melalui bukti ilmiah dan yang sangat penting, bahkan apa yang tidak diketahui. Evidence-based policy dapat berperan dalam siklus kebijakan, dalam menentukan agenda kebijakan, isu, berbagai alternatif pilihan, pilihan tindakan, mengeksekusi kebijakan, hingga

³⁰ Young, Ken, et al. "Social science and the evidence-based policy movement." *Social policy and society* 1.3 (2002): 215-224.

memantau dampak dan keluaran. Dalam riset yang dilakukan oleh Overseas Development Institute, penggunaan evidence-based policy secara baik telah membantu menyelamatkan kehidupan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kinerja pembangunan di negara berkembang. Persoalan yang ditimbulkan oleh pembuatan kebijakan yang dibuat tanpa bukti, tampaknya semakin membuka lebar mata para pembuat kebijakan untuk menerapkan evidence-based policy dalam penyusunan kebijakan. Di Indonesia, Lembaga Administrasi Negara (LAN) tengah mengembangkan aplikasi Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) yang diharapkan dapat membantu para pengambil kebijakan di Indonesia memproduksi kebijakan yang dilahirkan dari kerangka acuan dan basis pengetahuan yang kuat, implementatif, terkoordinir, dan disosialisasikan dengan baik dalam struktur organisasi dari level tertinggi sampai level operasional. Semua regulator dalam berbagai level pemerintahan, sebagai lembaga penghasil kebijakan yang dituangkan dalam bentuk undang-undang, peraturan dan regulasi, merupakan lembaga strategis yang mengatur kehidupan seluruh masyarakat

Indonesia dalam berbagai level dari nasional regional hingga lokal. Semua regulator dalam berbagai level pemerintahan melalui kebijakannya dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan angka harapan hidup, meningkatkan pendidikan masyarakat, memperluas kesempatan bekerja, dan dalam bidang keperdataan tentu saja dapat menata semua bidang perdata islam, dan masih banyak lagi yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya, khususnya umat islam di Indonesia. Oleh karena itu, sudah seharusnya Semua regulator dalam berbagai level pemerintahan dalam kerja legislasi dan regulasinya didukung oleh bukti yang valid, yang dihasilkan oleh berbagai hasil riset, sekali lagi berdasarkan hasil riset, agar menghasilkan produk legislasi dan regulasi yang berkualitas. Hasil kebijakan yang berkualitas, telah terbukti mendapat dukungan dari masyarakat luas.

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Selanjutnya legislasi dan proses regulasi yang baik akan dapat merangsang daya saing bangsa. Keluhan Presiden Joko Widodo yang disampaikan dalam Pidato Pelantikan di hadapan anggota MPR RI

pada tanggal 20 Oktober 2019 terhadap puluhan produk legislasi bahkan ratusan regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM, hingga persoalan keperdataan, telah memperlihatkan kualitas legislasi dan regulasi yang buruk. Pemangkasan dan revisi regulasi akan segera dilakukan. Namun demikian, dalam konteks *evidence-based policy*, para pembuat kebijakan harus mendasarkan pemangkasan dan revisi pada bukti yang kuat. Riset terhadap berbagai produk legislasi yang telah ada perlu digunakan.

Demikian pula riset terhadap rencana produk legislasi dan regulasi harus didasarkan pada *evidence-based policy*. Kehadiran Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Joko Widodo untuk mendukung penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional, melalui pengintegrasian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan

penerapan, serta invensi dan inovasi. Ini artinya *evidence-based policy* sudah harus diterapkan dalam perumusan dan penetapan kebijakan di Indonesia. Begitu pula dengan mengeluarkan kebijakan melalui alokasi pembiayaan untuk kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan. Biaya ini dimaksudkan agar kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan dapat menghasilkan invensi dan inovasi yang dapat digunakan untuk pembangunan nasional berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, serta dapat meningkatkan kemandirian, daya saing bangsa, dan daya tarik bangsa dalam rangka memajukan peradaban bangsa melalui pergaulan internasional. Dengan demikian, diharapkan mimpi Indonesia pada tahun 2045 Indonesia keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah dan menjadi negara maju dengan pendapatan Rp320 juta per kapita per tahun, Produk Domestik Bruto mencapai 7 triliun dollar AS, dan masuk 5 besar ekonomi dunia, dengan kemiskinan mendekati nol persen dapat terwujud.³¹ Demikian pula

³¹ Kompas, "PDB naik", dalam <https://money.kompas.com/read/2019/10/21/050900326/> 2045-

membangun daya saing bangsa melalui inovasi dan pembangunan SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi perlu digerakkan melalui model pendekatan evidence-based policy.

Derajat Hukum Keperdataan di Negara Hukum

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Semua kita sadar dan tahu, bahwa hukum merupakan instrument terbaik dalam menjalankan roda kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu sebabnya, Negara Indonesia merupakan salah satu Negara yang meletakkan prinsip-prinsip Negara hukum di dalamnya. Negara hukum, atau istilah lainnya yaitu *rechtsstaat* atau *the rule of law*, adalah negara yang setiap tindakannya, berdasarkan pada aturan atau sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan. Jika ada seseorang yang tindakannya melanggar aturan tersebut, maka ia berhak mendapatkan hukuman karena dianggap melanggar hukum. Menurut Plato, negara hukum adalah negara yang bercita-cita untuk mengejar kebenaran, kesusilaan, keindahan, dan

keadilan. Sedangkan menurut Aristoteles, negara hukum ialah negara yang berdiri berdasar hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negaranya. Secara umum,³² bahwa Indonesia merupakan Negara hukum dapat dilihat dari ciri-ciri Negara hukum sebagai berikut: pertama adanya sistem ketatanegaraan yang sistematis. Di setiap lembaga yang dibentuk, memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing untuk membantu menjalankan pemerintahan negara tersebut, agar nantinya dapat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Di Indonesia sendiri, dapat dilihat bahwa adanya kelembagaan seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Komisi Yudisial (KY), Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY), dan lembaga di daerah lainnya. Kedua, hukum sebagai patokan segala bidang atau biasa dikenal dengan istilah supremasi hukum. Ciri-ciri negara hukum yang satu ini merupakan upaya untuk menempatkan hukum dalam tempat tertinggi sebagai alat perlindungan bagi rakyatnya, serta tanpa adanya intervensi dan penyalahgunaan hukum, termasuk dari

³² Hardini, Sri. "Introduction to the Law of Indonesia." *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)* 2.1 (2016): 91-100.

para petinggi negara. Ketiga, adanya perlindungan dan pengakuan HAM. Ciri pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia ini merupakan salah satu ciri yang utama. Hak asasi manusia sendiri merupakan hak yang paling mendasar dan fundamental. Sedangkan bagi para pelanggar HAM dapat dijatuhi hukum secara tegas. Keempat, memiliki sistem peradilan yang tidak memihak. Sistem peradilan ini meliputi para hakim dan jaksa serta para anggota administrasi pengadilan yang telah ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku. Tak hanya di peradilan pusat, sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak juga berlaku di peradilan-peradilan daerah. Peradilan harus berjalan sesuai dengan hukum yang ditentukan dan diterapkan sama sehingga tidak berat sebelah antara rakyat dan para petinggi negara. Kelima, adanya pembagian kekuasaan yang jelas. Pembagian kekuasaan ini menjunjung tinggi nilai demokrasi. Dan setiap lembaga memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, sehingga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih. Jika muncul permasalahan atau konflik, maka lembaga yang berwenang mampu menerapkan hukum yang tepat. Seperti yang

disampaikan tokoh terkenal, John Locke, bahwa kekuasaan dibedakan menjadi tiga yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Keenam, ciri-ciri negara hukum yang berikutnya yaitu adanya peradilan pidana dan perdata. Peradilan pidana adalah peradilan yang mengurus tentang pelanggaran hukum yang menyangkut masalah pidana. Sedangkan perdata yang mengurus pelanggaran hukum yang melibatkan perseorangan dan masalah perdata. Ketujuh, adanya legalitas. Legalitas dalam hukum merupakan asas yang fundamental untuk mempertahankan kepastian hukum. Asas legalitas ini ditetapkan dan kemudian digunakan untuk melindungi semua kepentingan individu. Legalitas ini juga yang akan memberikan batasan kewenangan bagi para pejabat negara untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka jika mereka melanggar hukum dan aturan yang berlaku.

Prinsip-prinsip Negara hukum itulah yang membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bermartabat dimata dunia. Oleh sebab itu, koridor hukum dalam menangani berbagai perkara hukum termasuk kompetensi hukum keperdataan harus di

tegakkan dengan *legal system* yang berlaku.³³ Berbagai fenomena hukum yang terjadi saat ini sebagaimana yang telah saya uraikan di awal, rindu sekali terhadap kehadiran *system hukum* yang bermartabat dan memiliki derajat yang tinggi. Rindu sekali terhadap kehadiran para penegak hukum yang konon dikenal dengan *officium nobile*.³⁴ Rindu sekali terhadap kehadiran norma dan substansi aturan yang jelas, dan rindu sekali terhadap kehadiran budaya hukum yang nyaman dan menyadarkan.

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Bukti-Bukti Normatif-Empiris: *Existing Condition*

1. Bidang Perkawinan

Salah satu trending topik dalam hukum perkawinan yang sedang naik daun karena kasusnya sangat tinggi adalah dispensasi perkawinan. Perubahan usia minimal perkawinan seorang wanita dari 16 tahun menjadi 19 tahun telah merubah nilai kehidupan perkawinan, dan berdampak terhadap

³³ Friedman, Lawrence M. *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation, 1975.

³⁴ Hoekstra, Joost. *Officium nobile, officium durum*. Amsterdam University Press, 2002.

meningkatnya dispensasi perkawinan. Pada tahun 2018, jumlah pengajuan permohonan dispensasi perkawinan sebanyak 13.822. Sedangkan pada tahun 2019, jumlah permohonan meningkat menjadi 24.864 perkara. Jumlah tersebut meningkat drastis pada tahun 2020 yaitu sebanyak 64.192 perkara.³⁵ Banyaknya pengajuan dispensasi perkawinan, disebabkan banyak factor, baik ekonomi, disrupsi budaya dan gaya hidup, dan diantaranya karena kegagalan dari produk hukum itu sendiri dalam menertibkan batas usia perkawinan. Perubahan usia juga berpotensi menyumbang semakin meningkatnya angka *nikah sirri* dan perilaku seks bebas di kalangan usia siap menikah. Argumentasi hukum perubahan usia perkawinan sebagaimana Pasal 7 UU Nomor 16 tahun 2019, dalam perspektif *evidence based policy model* telah menegaskan 3 poin krusial. **Pertama**, perubahan usia perkawinan dari 16 tahun (wanita) menjadi 19 hanya berdasarkan pada pertimbangan politik global dan penerapan hak azasi anak yang tak seimbang, dari pada kepatuhan

³⁵ Horii, Hoko. "Marriage, Gender and Islam in Indonesia: Women Negotiating Informal Marriage, Divorce, and Desire, by Maria Platt." *Bijdragen tot de taal-, land-en volkenkunde/Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia* 174.2-3 (2018): 345-347.

terhadap nilai-nilai natural, etika dan norma agama. Hal ini tampak dari pengabaian terhadap pentingnya pemenuhan hak dan status kesucian biologis, dan bergeser pada standar kematangan emosional, tanggungjawab dan standar-standar internasional perlindungan hak anak. Padahal sifat-sifat yang terkandung didalam standar dewasa dalam hukum perdata islam seperti (*ba'ah, baligh, aqil dan mukallaf*) merupakan representasi seluruh sifat kedewasaan seseorang. **Kedua**, perubahan usia perkawinan menjadi usia 19 tahun dibangun berbasis tolak ukur usia masih memerlukan pertimbangan pengetahuan transdisipliner dan multiperspektif. Normativitas hukum yang memandang kematangan organ, emosional, tanggungjawab, kecakapan sosial dan pendidikan ternyata dipahami sebagai karakter yang terpisah dengan sifat natural yang terkandung didalam *ba'ah, baligh, aqil dan mukallaf*. Perubahan usia perkawinan dalam UU Nomor 16 taun 2019 menjadi bukti pemisahan dua kriteria kedewasaan berjalan secara paradoks. Dilihat secara biologis, usia *ba'ah, baligh, aqil dan mukallaf* merupakan usia yang siap menikah, namun disisi sosial usia *ba'ah, baligh, aqil dan mukallaf*

dianggap tidak matang dalam emosional dan tanggungjawab karena belum berusia 19 tahun. Anggapan pemerintah tentang persamaan hak wanita, minus emosional dan minus tanggungjawab inilah yang menjadi dasar pentingnya perlindungan hak anak dan wanita. Namun, *design* perumusan norma yang mengubah usia menjadi lebih tua merupakan wujud pengekangan terhadap hak-hak natural anak yang siap menikah. Ketiga, logika hukum yang dibangun UU Nomor 16 tahun 2019 belum mencerminkan ide dan cita hukum perkawinan yang ideal. Penyelundupan gagasan hukum tentang perubahan usia perkawinan terlihat masih berlindung dibalik dispensasi perkawinan. Penyelundupan hukum milik budaya luar dipaksakan untuk budaya hukum Indonesia. Hal ini pernah menjadi keprihatinan seorang musisi terkenal yaitu H. Rhoma Irama. Di dalam dua buah bait syair yang berjudul "pembaharuan" itu, H. Rhoma Irama menyebutkan bahwa:

*Di zaman pembaharuan
Banyak penyusupan
Tegarkan hatimu
Tegarkan sikapmu
Terhadap pengaruh asing
Yang bisa melanda*

*Kepribadian kita
Dan yang tiada sejalan
Dengan budaya bangsa*

*Pantas untuk bangsa lain
Belum tentu Indonesia
Baik buat bangsa lain
Belum tentu Indonesia
Benar kata bangsa lain
Belum tentu Indonesia
Selaraskanlah dengan Pancasila*

Tingginya angka permohonan dispensasi perkawinan, dan banyaknya celah hukum dari hulu ke hilir dalam peraturan usia perkawinan telah menegaskan, bahwa ada upaya merekayasa hukum melalui pendewasaan secara administatif, bukan pendewasaan secara psikologis dan biologis. Tingginya angka dikabulkannya pengajuan dispensasi perkawinan juga menunjukkan bahwa kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang menjadi karakter inti sebuah lembaga peradilan telah didominasi oleh penetapan-penetapan dengan *ratio decidendi* semu dan menggiring hakim masih hanya sebagai corong undang-undang.³⁶

³⁶ Fikriawan, Suad, Syamsul Anwar, and Misnen Ardiansyah. "The Paradigm of Progressive Judge's Decision and

2. Waris dan harta bersama

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Di era revolusi industri, harta kekayaan menjadi kebutuhan prioritas dalam menunjang ekonomi sebuah perkawinan.³⁷ Sedangkan di era disrupsi, pemenuhan harta 1000 kali lebih cepat lagi dan merubah epistimologi pemenuhan pencarian harta itu. Namun tidak sedikit, harta tersebut dapat menjadi sumber konflik berkepanjangan. Dinamika konflik harta dalam perkawinan, tidak dapat dihindari ketika keluarga modern memiliki hubungan yang semakin kuat dengan gaya hidup masyarakat industrial berubah menjadi gaya hidup masyarakat digital (*digital society*). Transformasi sosial dari masyarakat agraris menuju masyarakat industrial dan berubah menjadi digital society,³⁸ pada gilirannya turut mempengaruhi cara berfikir dan tata kehidupan masyarakat.³⁹

Its Contribution to Islamic Legal Reform in Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15.2 (2021): 249-262.

³⁷ Klaus Schwab, *The fourth industrial revolution*. Currency, New York, Crown Publishing 2017. p. 19.

³⁸ Nur Mazidah, "Relijiusitas dan Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Industri." *Jurnal Sosiologi Islam* 1.1 (2011). p. 54.

³⁹ Agarwal, Bina. "Gender and command over property: A critical gap in economic analysis and policy in South Asia." *World development* 22.10 (1994): 1455-1478.

Konflik pembagian harta bersama, secara faktual berbuntut permasalahan hak asuh terhadap anak, hak nafkah, dan penetapan asset lainnya.⁴⁰ Menurut Sayuti Thalib, harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.⁴¹ Pengertian tersebut selaras dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disingkat UUP) Pasal 35 Ayat 1 yang menyatakan, bahwa "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama." Konstruksi hukum harta bersama kemudian dijabarkan secara teknis di dalam Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI), yang tersebar dalam Bab XIII Pasal 85 hingga Pasal 97.⁴²

Legitimasi hukum harta bersama tidak terlepas dari munculnya semangat aktualisasi diri dan kiprah

⁴⁰ Faizal, Liky. "Harta bersama dalam Perkawinan." *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 8.2 (2015): 77-102.

⁴¹ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986. h. 85.

⁴² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995. P. 53.

seorang istri dalam hukum publik dan kehidupan sosial. Istri sebagai individu juga memiliki harapan, kebutuhan, minat dan kemandirian demi pengembangan diri.⁴³ Peran sosial dan ekonomi kaum wanita (isteri) yang terus meningkat saat ini, telah mereposisi kedudukannya dalam menjalankan fungsi-fungsi reproduksi, fungsi dapur dan berhias dimasa lalu.⁴⁴ Peran kaum wanita sering dilaksanakan berdasarkan asumsi-asumsi yang bersifat *fitrah* yang melekat pada istri. Tidak hanya itu, prototype terhadap isteri juga sering dikampanyekan melalui argumentasi teologis seperti pentingnya kepatuhan seorang istri kepada suami dan memposisikan suami sebagai sosok yang disakralkan.⁴⁵ Stratifikasi sosial terhadap istri ternyata menyentuh pula dalam aspek dominasi-dominasi

⁴³ E. Kristi Poerwandari, "Aspirasi Perempuan Bekerja dan Aktualisasinya" dalam T. Ihromi (ed.), *Kajian Wanita dalam Pembangunan* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1995), 314.

⁴⁴ Wanita suku Jawa pada masa lalu memiliki peran *masak* (memasak), *macak* (berhias), *manak* (melahirkan). Anam Miftakhul Huda, "The Identity of Javanese Women (The study of Phenomenology Toward Indonesian Migrant Women Workers)." *JARES (Journal of Academic Research and Sciences)* 1.1 (2016): 61-72. Lihat pula Burhanuddin, Hamam. "Pendidikan Berperspektif Gender di Pesantren." *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman* 2.1 (2015): 111-132.

⁴⁵ Mirya Anggraeni, dan Suyanto Suyanto. "Ajaran tentang Bakti Istri kepada Suami dalam Serat Wulang Reh Putri." *Nusa: Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra* 12.2: 108-117.

ekonomi, sebab istri dianggap hanya sebagai penerima nafkah, bukan pemberi nafkah.

Saat ini perempuan telah memiliki kedudukan yang sama dalam dunia politik, pendidikan, hukum, sosial dan ekonomi. Sehingga, banyak kita temukan kaum wanita (isteri) menjadi PNS, TNI, POLRI, praktisi politik, pengusaha, wiraswasta, bahkan menjadi Presiden. Peran dan kiprah seorang isteri saat ini telah berubah, sebagai wujud pentingnya kesetaraan terhadap gender.

Secara teoritis, sesungguhnya hukum asal dari hak kepemilikan harta adalah milik orang yang bekerja.⁴⁶ Kieff menyatakan, bahwa harta merupakan hak milik orang yang berkerenget, kerja keras, profesionalisme.⁴⁷ Jika suami bekerja dan memperoleh upah, maka penghasilan atau upah menjadi hak milik suami. Demikian halnya dengan isteri yang bekerja, maka isteri berhak atas upah atau hasil pekerjaannya dan menjadi pemilik haknya secara sempurna (*milik al-tam*). Harta menjadi milik masing-masing secara

⁴⁶ Muhammad Rusfi, "Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta." *AL-'ADALAH* 13.2 (2016): 239-258.

⁴⁷ F. Scott Kieff, "Property rights and property rules for commercializing inventions." *Minn. L. Rev.* 85 (2000): 697.

independen, dan bukan menjadi milik bersama. Tidak ada penyatuan atau pemisahan didalam harta masing-masing tersebut, karena semua diperoleh dari proses alamiah yaitu dari hasil kinerja dan keringat masing-masing, kecuali jika ditetapkan dalam perjanjian tentang kedudukan harta tersebut. Substansi peraturan hukum harta bersama yang termaktub di dalam UUP dan KHI, justru sebaliknya yaitu menyatukan harta apapun yang diperoleh dalam ikatan perkawinan sebagai hak kepemilikan bersama. Konstruksi hukum penyatuan atau kebersamaan harta bersama secara generalis inilah yang menumbuhkan benih-benih konflik dalam pembagian harta bersama. Konflik tersebut pada gilirannya, telah membawa suami isteri terlibat sengketa dan tidak sedikit berujung pada penyelesaian secara litigasi baik pada pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding bahkan hingga peninjauan kembali di Mahkamah Agung.⁴⁸ Meskipun telah melalui proses peradilan, konflik perebutan harta bersama berdampak luas menjadi

⁴⁸ Arifah S. Maspeke, dan Akhmad Khisni. "Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Fiqih dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12.2 (2017): 173-184.

konflik antara keluarga, bahkan menjadi konflik masal dan berujung pada kematian para pihak. Konflik demi konflik perebutan harta bersama tersebut terus terjadi hingga zaman modern saat ini. Salah satu alasan yang menyebabkan ketidakpuasan antara pihak adalah berkaitan dengan hak kepemilikan harta dan ketidakadilan dalam formulasi harta bersama yang *bias* jender.

Secara historis, penyelesaian sengketa harta bersama sebelum UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu melalui tokoh-tokoh agama, fatwa seorang *qadi*, pengadilan serambi, institusi *sara*.⁴⁹ Formulasi pembagian saat itu juga beragam, dan terjadi diberbagai daerah di Nusantara, seiring dengan berubahnya peran isteri dalam keluarga. Dinamika sosial seorang wanita terlihat ketika isteri turut bekerja

⁴⁹ Penyelesain sengketa harta Bersama pada abad ke 17 melalui tokoh agama, fatwa dan putusan qadhi. Salah satu contoh penyelesaian harta Bersama sebagaimana dipraktekkan dalam *adat badamai* Banjar Kalimantan Selatan. Diskusi Ahli, "Barang perbantangan: Sebuah Akomodasi Hukum Waris Islam atas Budaya Relasi Jender dalam Masyarakat Banjar," Jurnal Kebudayaan Kandil Melintas Tradisi, Edisi 7, Tahun II, 2004, p. 68. Lihat A. Hassan, *Al-Fara'id*, Surabaya; Pustaka Progressif, 2003, p. 121. Lihat juga Jumadi, "Institusi Sara' di Maros Sulawesi Selatan." *Attoriolong* "Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Penelitian Kesejarahan" 7.2 (2010): 1-104.

mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Gerakan emansipasi isteri, terjadi diberbagai daerah seperti di Banda Aceh, Sumatera Barat, Lampung, suku Jawa dan Madura, suku Sunda, Bali, dan Bugis.⁵⁰ Menurut tradisi masyarakat saat itu, ketika terjadi perceraian atau kematian, maka harta bersama yang diperoleh dalam ikatan perkawinan dibagi menjadi sepertiga untuk isteri dan duapertiga bagian untuk suami. Formulasi tersebut dikenal dengan istilah *hareuta sehareukat* bagi penyebutan istilah harta bersama di Aceh, harta *suarang* di Jambi, harta *massow bebesak* di Lampung, harta *guna kaya* di Sunda, harta *gono gini* di Jawa, harta *ghuna ghana* di Madura, harta *druwe gabro* di Bali, dan harta *cakkara* di Bugis).⁵¹ Pola tersebut menyebar luas ke berbagai daerah lainnya, sehingga dalam perspektif jender, ketentuan tersebut dianggap sebagai formulasi yang tidak mencerminkan nilai-nilai kesetaraan dalam relasi suami dan isteri. Sebab, harta yang menjadi sumber

⁵⁰ A. Hassan, *Al-Fara'id*, Surabaya; Pustaka Progressif, 2003, p. 121.

⁵¹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Undang-undang NO. 7 Tahun 1989*, Jakarta: Pusat Kartini, 1997, p. 298.

ekonomi merupakan harta yang berasal dari kerja keras kaum wanita (isteri).⁵²

Formulasi tersebut, berbeda dengan yang terjadi dalam budaya Banjar Kalimantan Selatan. Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan memiliki paradigma yang berbeda dengan budaya Aceh, Sumatera Barat, Lampung, Sunda, Jawa, Bali dan Bugis. Paradigma tersebut menjadi nilai kearifan lokal masyarakat Banjar yang terkenal dengan istilah *barang perpantangan*. *Barang perpantangan* merupakan kaidah penyelesaian pembagian harta bersama yang berasal dari budaya Banjar yaitu *adat badamai*. *Barang perpantangan* memiliki formulasi yang unik yaitu membagi harta bersama dengan cara membagi seperdua banding seperdua.⁵³

Suku banjar merupakan masyarakat mayoritas beragama islam,⁵⁴ dan banyak melahirkan tokoh-tokoh

⁵² Kellen Zale, *Sharing Property*, University of Colorado Law Review, 2016, p. 517.

⁵³ Diskusi Ahli, "Barang perpantangan....", p. 68.

⁵⁴ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, Bandung: Mizan, 1998, p. 252. Lihat Gazali Usman, *Kerajaan Banjar: Sejarah Perkembangan Politik, Ekonomi Perdagangan dan Agama Islam*, (Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, 1994), p. 19-20.

islam terkenal.⁵⁵ Menurut Alfani Daud seperti dikutip oleh Ahmadi Hasan,⁵⁶ secara historis masyarakat Banjar identik dengan Islam. Identitas muslim terlihat dalam perilaku orang Banjar yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang bersifat Islami. Salah satu tokoh Banjar adalah syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari,⁵⁷ pengarang kitab *Sabilal Muhtadin* yang fenomenal.⁵⁸

⁵⁵ Ibid, p. 252.

⁵⁶ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar, Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), p. 110.

⁵⁷ Al-Banjari lahir di desa Lok Gabang, kecamatan Astambul, kabupaten kota Intan Martapura, provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 19 Maret 1710 M, dan wafat 6 Sawal 1227 H. bertepatan tanggal 13 oktober 1812 M. dan dimakamkan di Dalam Pagar, Kalampayan, Astambul, kota Intan Martapura, provinsi Kalimantan Selatan. M.S. Kadir, *Shaikh Muhammad Arshad al-Banjari Pelopor Da'wah Islam di Kalimantan Selatan*, Mimbar Ulama, 6; 1976, p. 69. Abu Daudi, *Maulana Shaikh Muhammad Arshad al-Banjari* (Tuan Haji Besar), (Kal-Sel, Madrasah Sullam Al-Ulum, 1996), p. 15.

⁵⁸ Selain menulis kitab *Sabilal Muhtadin*, Al-Banjari juga menulis karya lainnya seperti *Tuhfah Raghabin* yang mengkaji tentang ilmu tauhid (1774 M.), *Risalah Qaul Mukhtasar fi 'Alamat Mahd Muntazar* (1781 M.), dan *Ushuluddin*. Sementara karya dalam bidang tasawwuf adalah *Fathurrahman Waliyurruслан*, dan *Kanzul Ma'rifah*. Sedangkan karya tulis yaitu *Parukunan Basar*, *Luqth al-'Ajlān fi Haidhi wa Istihazah wa Nifas Nisyan* (1778 M.), dan kitab *Sabil Muhtadin* (1780 M.), *Kitab Nikah*, *Ilmu Falak*, dan *Kitab Fara'id*. Konon di dalam kitab *al-Fara'id* itulah Al-Banjari merumuskan *barang perbantangan* sebagai solusi yang adil dalam menyelesaikan konflik harta bersama yang terjadi di masyarakat banjar Kalimantan Selatan. Abdurrahman, *Makalah Mengenal Karya Tulis Ulama Banjar: Menelusuri Karya-Karya*

Formulasi setengah banding setengah dalam kaidah *barang perpantangan* merupakan buah pemikiran al-Banjari yang menjadi sumber hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat banjar dalam menyelesaikan sengketa harta bersama.

Formulasi setengah banding setengah, ternyata bertentangan dengan kaidah penyelesaian sengketa harta bersama pada masyarakat umumnya. Meskipun berbeda formulasi dengan pola-pola *mainstream*, *barang perpantangan* lebih menarik perhatian masyarakat industrial dan pemerhati hukum keluarga di Indonesia.⁵⁹ Ada beberapa alasan masyarakat lebih memilih kaidah *barang perpantangan*, dari pada kaidah lainnya. Kaidah *barang perpantangan* dianggap lebih adil, baik dari sisi keadilan jender maupun keadilan ekonomi dalam pembagian hak ekonomi antara suami

shaikh Muhammad Arshad al-Banjari, Banjarmasin; Juli 1988, p. 11-16.

⁵⁹ *Barang perpantangan* menjadi kaidah dalam penyelesaian sengketa harta bersama di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menjadi rujukan dalam penyelesaian sengketa harta bersama dan didukung kitab-kitab fikih yang relevan.

dan isteri, karena menggunakan prinsip sama rata. Keadilan jender begitu jelas, ketika agama dan budaya memperhatikan dan memberi penghargaan yang tinggi terhadap kedudukan dan peran wanita modern dalam bekerja dan menghasilkan pundi-pundi ekonomi keluarga.⁶⁰ Penghargaan terhadap wanita menurut kaidah *barang perpantangan* telah dilakukan kaum wanita di Indonesia termasuk wanita suku banjar tempo dulu.⁶¹

Menurut Zuhdi,⁶² masyarakat Indonesia memiliki sejarah panjang dalam melibatkan perempuan dalam ranah publik seperti pasar dan pemerintahan. Peran publik wanita suku banjar dalam kegiatan sehari-hari diungkapkan oleh KH. Anang Ramli HAQ yang menyatakan bahwa:

⁶⁰ Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Isteri di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978, h. 41. Lihat Nur Khoirin Yd, *Marriage Treasure Ownership in Arabic and Nusantara Fiqh Perspectives*, ADDIN, Volume 12, Number 2, Agustus 2018, p. 567.

⁶¹ Hasil wawancara dengan Guru Irsyad Zein di Kelurahan Dalam Pagar, Kota Martapura, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia, 3 juli 2009.

⁶² Muhammad Zuhdi, "Challenging Moderate Muslims: Indonesia's Muslim Schools in the Midst of Religious Conservatism," *Religions*, 2018, 9, 310; doi:10.3390/rel9100310, h. 11.

*Galuh (gadis) banjar tu saban hari mambantu laki maulah buah tangan nangkaya topi dari purun, tikar, wadai, wan bajualan sayur, buah lawan iwak di pasar tarapung lawan pasar dimana haja.*⁶³

Menurut KH. Anang Ramli HAQ, wanita banjar setiap hari membantu suami membuat kerajinan tangan, seperti topi *purun*, tikar, kue, dan menjual sayuran, buah dan ikan di pasar dan pusat-pusat perbelanjaan. Kaum isteri dalam suku banjar mendayung sampan untuk menjajakan jualannya di pinggir sungai, dan pasar terdekat. Sementara suami biasanya bekerja di sawah, ladang dan mencari ikan di sungai. Kebiasaan ini berlangsung terus menerus menjadi sebuah tradisi yang eksis yang menghasilkan harta bersama dalam hubungan perkawinan.

Dalam perspektif jender, peran dan kinerja kaum isteri suku banjar seperti itu, layak memperoleh perhatian dari sisi hukum dalam pembagian harta bersama. Oleh karena untuk menghargai peran isteri dalam membantu ekonomi keluarga, maka formulasi setengah banding setengah menjadi alternatif yang

⁶³ Hasil wawancara dengan KH. Anang Ramli HAQ, Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia, 26 Mei 2012.

proporsional dalam membangun kesetaraan laki-laki dan wanita.

Dinamika peran isteri dalam masyarakat industrial semakin berat dan tidak terbatas pada fungsi privat.⁶⁴ Saat ini kaum wanita yang bekerja tak terhitung jumlahnya. Menurut T.O. Ihromi sebagaimana dikutip oleh Zikri Darussamin,⁶⁵ pada tahun 1976, jumlah persentase wanita dalam wilayah perkotaan yang bekerja sebagai pegawai dan buruh mencapai 46,29%, pengusaha wanita secara mandiri sebesar 28,43%, pengusaha dengan bantuan orang lain sebesar 6,6 %. Wanita memiliki peran penting dalam kehidupan keluarga, dan berbangsa. Dalam dunia politik, kaum wanita sudah banyak menjadi anggota DPR, Gubernur, Bupati, bahkan Presiden.⁶⁶ Sementara dalam dimensi sosial dan ekonomi, kaum wanita telah berkiprah

⁶⁴ Mahsun Hasan, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2004, h. 42

⁶⁵ Zikri Darussamin, "Hak Harta Bersama bagi Istri yang Bekerja Perspektif Maqashid asy-Syari'ah," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 51, No.2, Desember 2017, h. 371. Lihat T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999, h. 169

⁶⁶ Muhammad Zuhdi, "Challenging Moderate Muslims: Indonesia's Muslim Schools in the Midst of Religious Conservatism," *Religions*, 2018, 9, 310; doi:10.3390/rel9100310, h. 11.

menjalankan fungsi-fungsi bisnis dan pelayanan publik seperti pemimpin perusahaan, dosen, guru, sopir, pilot, dokter dan lain-lain. Data Bank Dunia pada 2018 menunjukkan bahwa 50,7 persen perempuan Indonesia berusia 15 tahun ke atas berpartisipasi dalam angkatan kerja.⁶⁷

Kenyataan ini jauh berbeda di masa jahiliyah dan islam awal, *tirkah* dalam kebiasaan masyarakat Arab pra Islam hanya diberikan kepada golongan laki-laki. Perempuan tidak berhak memperoleh bagian dari harta warisan. Salah satu alasannya adalah karena hanya laki-laki yang profesional yang bisa menunggang kuda, menanggung beban ekonomi keluarga dan berperang.⁶⁸ Dalam tradisi jahiliyah, ada sebuah adagium yang sering diucapkan mereka yaitu "*la nurithu man la yarkabu farasan wa la yahmilu kalkan wa la yanka'u 'adwan*," maksudnya adalah "kami tidak memberikan harta waris atau *tirkah* yang tidak ahli menunggang kuda, tidak bisa menopang ekonomi

⁶⁷ World Bank, *Level of Participation of the Female Labor Force in ASEAN Ages Over 15 Years*, New York, 2019. p. 32.

⁶⁸ Syafiq Hasyim, *Hal-hal Yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuan dalam Islam*, Bandung; Mizan, 2001, p. 19-20.

keluarga dan manusia lemah serta tidak bisa berperang.”

Relasi harta dalam perkawinan menempatkan posisi seorang istri yang sukses secara ekonomi ditempatkan dalam posisi yang canggung. Di satu sisi wanita muslimah Kelas menengah Indonesia merundingkan penerapan nilai-nilai Islam, tetapi di sisi lain mereka harus memperluas tanggung jawab mereka kepada ruang publik untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.

Berkenaan dengan data, perhatian lebih harus diberikan pada jumlah keputusan litigasi berdasarkan kontribusi kualitatif dan kuantitatif kontribusi atau pola lain yang memungkinkan. Dari 18.000 lebih kasus sengketa harta bersama yang diputuskan oleh Pengadilan Agama kabupaten/kota, Pengadilan Tinggi Agama provinsi, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, setidaknya ada lima model pembagian harta dalam penyelesaian sengketa properti perkawinan ini, Pertama, 57% kasus diselesaikan dengan formulasi $1/2:1/2$ (separuh, setengah), ada $1/3 : 3/4$ sebanyak 14% dari total keputusan, pola $1/4 : 3/4$ sebanyak 14 %, dan sesuai kesepakatan yaitu 10% dari total

kasus. Keputusan berdasarkan kontribusi kualitatif yang membagi harta $\frac{1}{2}$ banding $\frac{1}{2}$ ternyata lebih dominan dalam sejarah panjang penyelesaian sengketa harta perkawinan di Indonesia. Hal ini menjadi bukti, bahwa keputusan hakim di Indonesia ternyata lebih meminati paradigma yang diusung oleh tokoh ulama dan waliyullah yang berasal dari Banjar yaitu syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari.

3. Penyelenggaraan haji

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Problem normatif dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah terlihat dari masih lemahnya semangat *maqashid syariah* haji yaitu azas *mabrur* dan azas *istitha'ah* di dalam seluruh klausula pasal demi pasal, dan di dalam 2 pasal yaitu pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1).

Dalam filsafat hukum dan pembentukan sebuah aturan, prinsip atau azas merupakan pondasi dari sebuah norma dan turunannya. Prinsip *mabrur* yang mengilhami semua norma dalam peraturan penyelengaran haji, dapat mengukur tingkat moralitas

dalam penerapan syariat haji. Demikian halnya dengan kriteria mampu (istithaah) sebagai syarat seseorang wajib ibadah haji.

Selanjutnya menurut pasal 4 UUPH, kriteria istithaah belum diakomodasi secara jelas, hal ini dapat dilihat dari redaksi normative dalam Pasal tersebut yaitu:

Pasal 4

- (1) Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dapat mendaftar sebagai Jemaah Haji dengan membayar setoran awal dan menyerahkan salinan dokumen kependudukan yang sah.

Ketiadaan istithaah dalam pasal 4 di atas, tentu akan membuka peluang antrian semakin panjang. Sebab, pasal di atas menuntut semua warga baik yang mampu maupun yang tidakmampu pada level ekonomi untuk mendaftarkan diri akan terbuka lebar.

Kriteria syarat calon haji juga menarik untuk cermati dalam UUPH. Dalam pasal 5 ayat (1) berbunyi:

Pasal 5

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:
 - a. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah;
 - b. memenuhi persyaratan kesehatan;

- c. melunasi Bipih; dan
- d. belum pernah menunaikan Ibadah Haji atau sudah pernah menunaikan ibadah Haji paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak menunaikan Ibadah Haji yang terakhir.

Ada dua kriteri yang seharusnya menjadi perhatian bersama, yaitu Kriteria usiapaling rendah 18 tahun dan kriteria paling singkat 10 tahun setelah haji terakhir. Dalam pasal 5 di atas tentu saja seyogyanya menjadi perhatian, pemenuhan azas sesuai syariat haji, bahwa seseorang yang layak ibadah haji adalah orang layak sesuai syariat haji. Demikian halnya dengan masa tunggu 10 tahun paling singkat, merupakan aturan yang belum mampu secara drastic mengurangi antrian haji. 10 tahun merupakan waktu yang masih sigkat dalam menunggu antrian. Padahal jika sesuai syariat haji, haji hanya diwajibkan sekali seumur hidup dan bagi yang mampu saja.

4. Pengelolaan zakat

Beberapa keresahan hukum didalam sistem pengelolaan zakat adalah dinamika kesumiran kelembagaan zakat sebagai operator sekaligus regulator, kekokohan mustahiq permanen, serta masih

banyaknya wajib zakat yang belum menyalurkan zakat secara tepat. Pelanggaran hukum lainnya juga terjadi pada sisi penerima zakat. Penyaluran zakat masih belum tepat sasaran pada mustahiq zakat. Masih banyak di antara penerima zakat merupakan orang-orang yang tidak layak menerima zakat. Berbagai modus dilakukan agar mendapatkan zakat, mulai dari pemalsuan identitas dan status ekonomi, pengakuan fakir miskin, dll. Pelanggaran demi pelanggaran yang terjadi di bidang zakat hingga saat ini, belum mendapatkan perhatian yang serius dari aspek penegakkan hukum terhadap aktor-aktor pelanggar zakat.

Berbagai hasil penelitian menyebutkan bahwa penyebab lemahnya penegakkan hukum di bidang zakat salah satunya dilatari belum adanya aturan atau norma dasar yang komprehensif untuk menjerat para pelanggar zakat. Kekosongan norma dapat dilihat di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (disingkat UUPZ) beserta derivasinya. Peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat kebanyakan hanya mengatur kelembagaan dan system pengelolaannya. Namun

norma-norma yang bersifat afirmatif dalam mengontrol gerakan individu-individu pelanggar zakat, mulai sanksi bagi yang enggan berzakat dan sanksi para penerima zakat palsu atau mustahiq yang tidak sesuai 8 *asnaf*, belum diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Sanksi hukum dalam UUPZ lebih banyak mengatur hukuman bagi lembaga yang tidak amanah dalam mengelola zakat. Norma yang mengatur sanksi pelanggar zakat dalam UUPZ masih belum ada dan hanya mengandalkan sanksi pada basis hukuman moral dan sanksi agama semata. Sanksi agama dalam fikih zakat beragam. Umat islam tampaknya mulai mengalami pergeseran dalam merespon sanksi agama yang sesungguhnya sangat mengerikan dan diperlukan pendekatan keimanan yang kokoh. Banyak factor yang menjadi penyebab pergeseran kuatnya dan lemahnya seseorang gemar mengamalkan zakat. Jika dimasa lalu, kita sering membaca bagaimana nilai-nilai pengamalan zakat yang dirasakan para sahabat begitu mendalam sehingga ketika ada perintah zakat, maka dengan mudahnya para sahabat dan tabi'in menyalurkan sebagian bahkan seluruh harta yang

mereka miliki. Banyak fakta yang menyebutkan bahwa, pelaksanaan zakat tersebut disebabkan oleh kecintaan dan keimanan yang begitu mendalam terhadap perintah Allah dan Nabi Muhammad saw. Kegemaran berzakat juga di sebabkan oleh rasa takut terhadap begitu beratnya sanksi agama bagi yang tidak berzakat serta pengharapan yang besar terhadap balasan nikmat terhadap yang gemar berzakat.

Di era modern seperti saat ini, sanksi berbasis agama tampaknya telah memudar. Sanksi agama yang digadang mampu menumbuhkan semangat kesadaran spiritual, justru semakin tidak relevan lagi untuk mengatasi menguatnya sifat tamak si kaya dan si miskin. Berbagai media terlalu banyak memberitakan bagaimana bantuan sosial untuk penanganan dampak covid19 yang seharusnya disalurkan kepada fakir miskin namun belum tepat sasaran.

Hubungan berzakat harus di atur sebagai hubungan hukum diantara dua pihak yatu muzakki dan mustahiq zakat. Muzakki berkedudukan sbg pihak yang wajib berzakat, dan mustahiq adalah penerima zakat yang riil merupakan orang yang berhak. Satu pihak yang tidak diabaikan adalah Amil zakat. Amil zakat

adalah pihak penengah yang mendapatkan amanah untuk mengelola dan menyalurkan amanah zakat tersebut. Ketiga aktor subyek hukum zakat tersebut memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam norma hukum.

Tiga aktor itu memiliki hubungan hukum yang kuat. Sebagai Negara hukum seyogyanya patuh terhadap hukum dan menjalankan semua priaku berdasarkan hukum seyogyanya menjadikan hubungan 3 aktor itu ke dalam koridor hukum bukan sekedar kesadaran dan sanksi moral atau sanksi agama.

5. Penataan Industri Keuangan Islam dan Pertumbuhan PINJOL

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Pinjol atau pinjaman online, merupakan fenomena aktual di era disruptif. Dahulu jika meminjam dana, selalu face to face, person to person. Maka saat ini pinjaman sudah dapat dilakukan jarak jauh, tanpa sekat, bebas, dan cepat. Kesan mudah, cepat dan instan memang tak selamanya menyenangkan dan baik. satanya diperlukan regulasi khusus yang mengatur mengenai pinjaman online. Masalah pinjol

tidak sebatas pada persoalan perdata, melainkan sekarang sudah masuk pada ranah pidana.⁶⁹

Adanya anggapan bahwa pinjaman online itu menyengsarakan masyarakat, sebetulnya adalah hal yang keliru. Berdasarkan data yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan (OJK), per 28 Oktober-30 September 2021 terdapat 772.534 pemberi pinjaman dengan jumlah peminjam (borrower) sebanyak 70.286.048 orang. Sedangkan total pinjaman yang disalurkan berjumlah Rp262,933 triliun.⁷⁰ Dari data ini bisa diambil kesimpulan, bahwa pinjol sebenarnya diminati dan dibutuhkan oleh masyarakat. Pada dasarnya pinjaman online adalah hal yang baik untuk memberikan pendanaan kepada masyarakat yang tidak bisa dilayani oleh sektor keuangan formal.

Pinjol akan terasa menyengsarakan bila masyarakat terjebak dalam pinjol ilegal. Tercatat, total pinjol ilegal yang sudah dihentikan oleh satgas waspada investasi hingga juli 2022 mencapai 3.960

⁶⁹ Sugangga, Rayyan, and Erwin Hari Sentoso. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal." *Pakuan Justice Journal Of Law* 1.1 (2020): 47-61.

⁷⁰ Triansyah, Abdurrazaq, et al. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Ilegal (Studi Kasus Pinjol Ilegal di Yogyakarta)." *Cross-border* 5.2 (2022): 1090-1104.

entitas.⁷¹ Jumlah ini terbilang menurun bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Guna menata dan mengendalikannya, paling tidak ada strategi pemberantasan Pinjol ilegal bisa melalui dua cara, yaitu pencegahan dan penindakan. Pencegahan bisa dengan mengintensifkan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya Pinjol ilegal. Selain itu, perlu ada moratorium izin Pinjol untuk menyelamatkan masyarakat dari jebakan Pinjol ilegal. Sementara dari sisi penindakan, penegak hukum bisa menerapkan UU Informasi dan Transaksi Elektronik atau KUHP.

Tumbuh-suburnya Pinjol tidak lepas dari perkembangan keuangan makro dalam industry keuangan. Terkait hal itu, saya mendeteksi ada 2 klaster prospektus industry keuangan syariah dan ada 1 tantangan industry keuangan syariah global di masa endemic, masa disrupti dan menyongsong era 5.0. Dua prospectus itu saya sebut *big why prospectus* dan *strong why prospectus*. Sedangkan satu tantangan

⁷¹ Kompas, dalam <https://money.kompas.com/read/2022/05/26/113036426/terbaru-ini-daftar-100-pinjol-ilegal-2022-yang-ditutup-ojk>. Di akses tanggal 1 juli 2022.

industri keuangan syariah, akan saya sampaikan di akhir paragraf ini.

Daya saing industry keuangan syariah nasional sejak tahun 1991 hingga saat ini memang perlu dievaluasi dari berbagai sisi. Namun, secara umum kita semua sudah dapat merasakan dampak positif kehadiran lembaga ekonomi syariah khususnya sektor industry keuangan syariah. Dilihat dari sisi *big why prospectus*, saya mengamati system dan asset industry keuangan islam amat tak terhingga banyaknya. Paling tidak ada 5 asset besar industry keuangan syariah yang tidak akan habis hingga hari qiyamat. Kelima asset itu adalah intellectual capital, human capital, social capital, religious capital, dan nature capital. Intellectual dan human capital setiap hari terus bertambah seiring bertambahnya para pemikir dan akademisi dalam mengkaji perkembangan keuangan islam hingga saat ini. Intellectual asset tak pernah berhenti pada satu ide dan berpijak pada epistemology ijtihad lama namun sudah bergerak pada pengkajian berbasis neo-ijtihad di bidang ekonomi islam modern. Demikian halnya dengan social capital yang dimiliki global dan nasional seperti Indonesia.

Segmentasi pasar yang luas dan tak terhitung jumlahnya, membentuk iklim baru yaitu pasar bebas moneter syariah bukan hanya dilingkup Negara-negara OKI, tapi diminati masyarakat diseluruh dunia. Trend masyarakat global terhadap frame bisnis berbasis ekonomi syariah, perlahan mulai menemukan makna lain, berupa kesadaran religious (kasadaran moral) yang merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan bahkan menjadi capital berharga dalam perkembangan semua bisnis.

Selanjutnya, asset terbesar yang menjadi perhatian industry keuangan syariah adalah nature capital. "Ngobrolin" modal alam ini, sangat membangkitkan nafsu bisnis jika target itu adalah sumber daya alam Indonesia. "Untuk proyek bisnis alam, apa yang tidak bisa," kebijakan kredit sindikasi, dan pembiayaan sindikasi telah melebur menjadi proyek raksasa yang banyak merusak alam namun menghasilkan pundi-pundi uang. Prospek proyek bisnis ini kemudian dimodifikasi oleh industry keuangan konvensional dan syariah global, menjadi proyek bisnis yang ramah lingkungan. Paradigma ini dibangun berdasarkan prinsip *green economy* dan melahirkan

paradigm baru dalam dunia keuangan yang biasa dikenal dengan *green banking system*. Berdasarkan prinsip *green economy* dan *green banking* itulah hampir semua Negara mengeluarkan kebijakan pengembangan lingkungan darat, dalam proyek-proyek seperti food estate, farm estate, dll.

Tidak hanya di darat, sasaran bisnis juga telah menyentuh pada bisnis sumber daya air dan kemaritiman. Proyek bisnis pembiayaan dari industry keuangan syariah terutama bank plat merah milik Indonesia, telah berhasil memberikan kucuran dana segar pasca IPO dengan menargetkan proyek bisnis besar yang ramah maritim atau biasa dikenal dengan istilah *blue economy* dan *blue banking project*. Saya meyakini, pada masa yang akan datang, industry keuangan syariah tidak mustahil akan membangun proyek-proyek besar dalam dunia kedirgantaraan dan pengembangan sumber daya udara. Pembangkit listrik tenaga udara, teknologi mobilisasi pesawat terbang jarak dekat dll. Inilah *big asset* dalam *mindset big why* yang sudah kita miliki dalam industry keuangan syariah Indonesia.

Lantas bagaimana *existing strong why* industry keuangan syariah saat ini. Juga tidak kalah cepatnya dengan berkembangnya *big asset* yang kita miliki. Kekuatan asset industry keuangan syariah adalah berhulu pada kekuatan *qanun* (UU), kebijakan, regulasi, dan fatwa dalam mengawal syariah compliance di bidang keuangan syariah. Untuk *strong why system* keuangan syariah ini saya tidak banyak mengulas karena begitu banyak UU, kebijakan, regulasi hingga fatwa yang sudah mengatur keuangan islam. Bagi saya, jumlah kekuatan UU, kebijakan, regulasi dan fatwa yang melimpah itu, merupakan *strong asset* yang tidak dimiliki Negara-negara lain dalam melaksanakan bisnis keuangan syariah. Itulah dua prospek industry keuangan syariah saat ini, yang layak mendapatkan apresiasi semua pihak.

Tantangannya satu saja, yaitu apakah industry keuangan syariah sudah benar-benar bisa membahagiakan umat? Apakah industry keuangan syariah saat ini sudah menemukan, kemana arah tujuan dan makna tertinggi industry ini didirikan?. Dua pertanyaan itu adalah pertanyaan yang akan mengarahkan industry keuangan syariah akan

menemukan titik *grand why*-nya. Untuk menjawab itu, saya coba ceritakan sedikit perkembangan industry keuangan misalnya perbankan syariah BUMN sebelum dan sesudah *merger*. Sebagai wujud perkembangan teori-teori dan paradigma segar di bidang kelembagaan keuangan syariah, peran kebijakan menduduki kluster urgent dalam memajukan industry keuangan syariah di Indonesia. Wujud produk itu dengan di tandainya bersatunya 3 perbankan syariah BUMN menjadi BSI, tumbuhnya teori dan konsep baru dalam rantai pasok halal (*halal value chain*), seperti *halal financing*, *saham syariah*, *halal travelling*, *halal tourism*, *halal cosmetic*, *halal life style*, *halal food*, *halal marketing*, dll yang ditandai dengan berdirinya hotel syariah, pariwisata syariah, kuliner halal, pengendalian *latte factor* pada tahun 2021. Bersatunya kelembagaan dan tumbuhnya industri-industri keuangan syariah diluar perbankan meluas menjadi berbagai sektor merupakan tanda awal bahwa system industri keuangan syariah telah diterima oleh pasar. Penerimaan pasar terhadap berbagai produk keuangan syariah adalah wujud mulai adanya gerakan menuju *grand why*. *Grand why* adalah *living in the grand why*, menjadikan seluruh nadi kehidupan dan

jiwa industry keuangan syariah hanya berjalan berdasarkan kerinduan terhadap makna dibalik bekerjanya seseorang, dan makna dibalik kinerja keuangan (*meaning of work*), serta bekerja keras menuju tujuan utama (*purpose of work*) industry keuangan syariah. Singkatnya *grand why* industri keuangan syariah merupakan visi tertinggi yang dicapai yang ditandai ketika sebuah lembaga/organisasi menemukan *meaning* (makna) dan *grand purpose* (tujuan tertinggi yaitu Allah SWT). Saya kira inilah tantangan terberat bagi industry keuangan syariah. Namun apabila *grand why* ini bisa ditemukan, saya yakin tantangan ke dalam (*internal of inner journey*) justru menjadi peluang yang ketiga menuju tangga kemajuan puncak bagi industry keuangan syariah dimasa mendatang.

Moralitas dan Hukum Keperdataan Islam di Indonesia: Saatnya Rujuk Kembali
Hadirin sekalian yang saya hormati,

Banyak pakar hukum, yuris menyatakan bahwa moral berbeda dengan hukum. Moral itu sesuatu yang abstrak, moral hanya di dalam. Moral itu semu, bahkan

moral itu tiada nyata. Moral tidak sanggup menindak sebuah peristiwa hukum dan perbuatan hukum.⁷² Sebaliknya, hukum adalah sesuatu yang tampak, sedangkan moral adalah sesuatu yang tidak tampak nyata. *Nahnu nahkumu bi dhawahir wa Allahu yatawalla al-sarair.*⁷³ Yang artinya, kita hanya menghukum apa yang tampak, dan Allah menentukan apa yang tersembunyi di dalam hati. Kita hanya bisa berhukum pada dimensi fisik yang terlihat semata. Banyak pula yang menyatakan bahwa moral tidak ada hubungannya dengan hukum, namun ada pula yang menyatakan bahwa moral justru jantungnya hukum, hukum adalah moral, dan moral sangat menentukan hukum akan seperti apa dan mau di bawa kemana.

Menurut hemat saya, dimensi moral adalah ruh dari hukum itu sendiri. Posisi moral sebagai ruh hukum, termasuk hukum perdata Islam, manakala moral difungsikan dalam dua tempat, yaitu sebagai fungsi ide/ideology/cita/gagasan hukum, dan fungsi preventivitas hukum. Moral sebagai cita hukum atau

⁷² Fuller, Lon Luvois. "The morality of law." (1964). Hal. 82.

⁷³ Razy, Fakhruddin Al, Tafsir al Kabir aw Mafatihul Ghaib, Juz XXXIII, TT, Tanpa Penerbit. Hal. 629.

ide utama sebuah hukum, akan berfungsi sebagai tombol instrumen penerima bisikan dan instrumen penghembus energi kebaikan atau kejahatan. Tombol moral inilah yang akan membisikan dan menghembuskan 2 energi, apakah energy kebaikan (taqwa) atau energy kejahatan (fujur). Moral sebagai ide inilah yang direkam oleh Stephen covey dalam bukunya the 7 habits of highly effective people dengan kalimat yang sangat indah yaitu *all things are created twice*, bahwa segala sesuatu tercipta dua kali.⁷⁴ Pertama tercipta di alam ide, gagasan, konsep-konsep dan pemikiran, sedangkan yang kedua tercipta di alam kenyataan, fisik, *dhahiriyah*, jasmaniyah. Tuntaskan dulu ide moralnya, baru eksekusi kebijakannya. Banyak orang menyangka, teori Stephen covey ini luar biasa, padahal di dalam islam jauh lebih luar biasa. Dalam islam, segala sesuatu tidak tercipta dua kali, tetapi segala sesuatu terbentuk 3 kali. *Kullu syai'in mashnu'un min tsulatsiyyil ab'adi, attashdiqu bilqalbi*,

⁷⁴ Covey, Stephen R., and Sean Covey. *The 7 habits of highly effective people*. Simon & Schuster, 2020.

*wal iqraru billisani, wal'amalu bil arkan.*⁷⁵ Segala sesuatu dibentuk berdasarkan 3 dimensi sikap, yaitu kejujuran dalam jiwa, komitmen iqrar dalam perkataan atau kebijakan, dan keberanian yang dibuktikan (evidence) dalam penindakan atau perbuatan. Ketiga dimensi itu sangat terkait dan menentukan *result oriented*.⁷⁶ Demikian halnya dalam dunia hukum, dimensi moral sangat mempengaruhi mutu sebuah hukum. Apalagi jika di kaitkan dengan sebuah keadilan.

Dinamika hukum perkawinan, perdebatan usia perkawinan, penyelenggaraan haji, pengelolaan zakat, penyelesaian sengketa harta bersama, penanganan stunting, penanganan pinjol ilegal bahkan pemberantasan extra ordinary crime seperti korupsi, narkoba, jangan sekali-kali mengabaikan dimensi moralitas dalam ber hukum. Dimensi moralitas itulah yang akan membawa hukum dalam derajat yang mulia sebagaimana Negara kita yaitu Negara hukum. Tapi

⁷⁵ Frank, Richard M. "Knowledge and Taqlid: The foundations of religious belief in classical Ash'arism." *Journal of the American Oriental Society* (1989): 37-62.

⁷⁶ Burton, Rob JF, and Gerald Schwarz. "Result-oriented agri-environmental schemes in Europe and their potential for promoting behavioural change." *Land Use Policy* 30.1 (2013): 628-641.

jika dimensi moralitas ini lemah, maka *mas'uliyah* dari sebuah hukum tidak akan berfungsi sama sekali. Peraturan dan regulasi hanya berdiri bagai batu mati, tiada berfungsi dalam merekayasa kehidupan sosial.

Selanjutnya, moralitas berfungsi sebagai ide dalam preventivitas hukum. Pada posisi ini, moralitas sangat efektif dalam memberikan pencerdasan dan pelayanan pencegahan terhadap distorsi perilaku masyarakat. Moralitas dapat menjadi instrument kurikulum dalam training-training, kurikulum pendidikan yang lebih banyak lagi, edukasi-edukasi, sosialisasi, dan pelayanan hukum dalam mencerdaskan kehidupan ber hukum yang tepat dan baik. Hari ini kita banyak dipertontonkan tentang penindakan, dari pada pencegahan. Hukum seolah tertinggal, dan selalu terlambat dalam mencegah *caos* dalam kehidupan berbangsa. Sehingga tidak heran, jika ada adagium *het recht hink achter de veiten aan*, hukum ternyata selalu terseok-seok/tetatih-tatih mengikuti perkembangan zaman. Hukum terseok-seok mengejar fakta atau peristiwa yang seyogyanya di aturnya. Paradigm ini sudah seharusnya menjadi perhatian semua profesi *officium nobile* (jaksa, hakim, polisi, advokat). Agar

hukum ke depan dapat lebih progresif lagi, dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang semakin sulit untuk dikendalikan. Kedudukan moral melalui level pencegahan inilah yang harus kita prioritaskan bersama.

Pentingnya integrasi moralitas dan hukum, maka pada tahap selanjutnya adalah upaya bagaimana memperlihatkan apa sebenarnya wujud dari penyatuan tersebut. Wujud integral antara dimensi moral dan dimensi hukum yaitu dengan memanifestasikan dalam wujud sumber daya manusia yang menjadi bagian dari struktur hukum. Struktur hukum yang terdiri dari semua level sumber daya manusia harus memahami jati diri sebagai penegak hukum, dan pelayan hukum yang baik di masyarakat. Demikian juga dengan masyarakat. Masyarakat yang memiliki moral yang tinggi, akan lebih kuat secara mental, lebih sabar sehingga tidak mudah gegabah. Tidak gampang menceraikan, dan tidak pula mudah diceraikan. Bukan sebaliknya, mudah menceraikan dan mudah diceraikan. Manusia yang memiliki moral yang tinggi, akan memiliki empati yang tinggi pula sehingga mudah berbagi, memberi zakat, sedekah dll. Mereka akan menjadi manusia-manusia

givers, bukan manusia *hikers*, atau *campers*. Sumber daya manusia yang memiliki moral yang bagus, tidak mudah terbawa arus hawa nafsu untuk berlomba-lomba bertransaksi secara gegabah, *gharar* bahkan ribawi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Mereka tau jika pelanggar hukum masih bisa di atur, tapi mereka menyadari bahwa pelanggar moral tidak ada yang bisa mengatur, karena sanksi moral merupakan sanksi hukum otonom atau sanksi berbasis karma. Oleh sebab itu, sudah saatnya moralitas dan hukum yang selama ini bercerai agar rujuk kembali,⁷⁷ mengawal kemajuan bangsa Indonesia yang sudah berusia 77 tahun ini menjadi lebih baik, sejahtera, adil, makmur, *toto, titi, tentrem kerto raharjo, ing ngarso sung tulodo, ing madiyo mangun karso tut wuri handayani.*

Simpulan

Dimensi moralitas yang seyogyanya menjadi ruh dalam hukum perkawinan, waris, harta bersama, penyelenggaraan haji, pengelolaan zakat, penataan pinjol, pengaturan industri keuangan, ekonomi dan

⁷⁷ Kramer, Matthew H. "Where law and morality meet." (2008). Hal. 4.

bisnis islam, pelan namun pasti telah kehilangan posisi dan martabat. Ada tiga faktor penyebab hilangnya moralitas itu, **pertama** mulai tercerabutnya falsafah budaya, hidup dan jiwa bangsa Indonesia (PANCASILA) dalam kehidupan ber hukum. **Kedua** karena lemahnya integrasi nilai-nilai agama (dalam agama islam dikenal dengan 6 rukun iman, 5 rukun islam, dan 1 rukun ihsan). **Ketiga**, karena memang moralitas dan hukum telah bercerai lama sekali dan tak kunjung rujuk kembali.

Berbagai persoalan hukum di atas, secara teoritis menuntut perlu lahirnya paradigm baru sebagai solusi dan langkah kebijakan ke depan. **Di bidang perkawinan** dan perceraian, azas pendewasaan secara administratif merupakan prinsip yang harus ditinjau kembali karena bertentangan azas mempermudah perkawinan. Hari ini justru sebaliknya, hubungan perkawinan dan perceraian menjadi terbalik. Yang seharusnya perkawinan dipermudah, dan perceraian harus dipersulit, berubah menjadi perkawinan harus di persulit dan perceraian harus dipermudah. **Di bidang pengelolaan zakat**, khususnya zakat konsumtif, paradigma hukum zakat di

era disruptif juga harus dirubah. Dari memberi zakat berupa makanan pokok seperti beras, gandum dan jagung atau paket sembako. Maka zakat di era disruptif dalam menanggulangi stunting, zakat harus memperhatikan komposisi gizi, vitamin dan mineral. Gagasan ini, disebut dengan zakat nutrisi. **Di bidang harta bersama**, pembagian $\frac{1}{2}$ banding $\frac{1}{2}$ sebagai wujud nilai-nilai keadilan gender dalam semangat harta perbantangan budaya banjar yang merupakan buah pikir syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ternyata menjadi trending dan lebih diminati oleh masyarakat dunia khususnya Indonesia. Dan seterusnya, dan seterusnya.

Meskipun disatu sisi, moralitas telah tercerabut dari akar-akar budaya dan jiwa bangsa, ketahanan struktur hukum atau SDM kita dari sisi makro masih dapat diandalkan. Para **yuris**, masih banyak mengakomodasi nilai-nilai kearifan budaya lokal dan islam nusantara dalam menyelesaikan sengketa harta bersama, para pengelola zakat baik BAZNAS pusat maupun Dompot duaafa masih keras dalam berfikir untuk melahirkan paradigma baru dalam mensinergikan zakat dan pajak, serta zakat nutrisi bagi

stunting, beberapa perusahaan besar sudah banyak menerapkan tata kelola hulu dan hilir berbasis *green economy* dan *blue economy* yang ramah lingkungan, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini artinya, nilai budaya, nilai moral dan nilai hukum ternyata masih ada. Mereka itulah manusia integratif yang berhasil memadukan nilai keadilan, dengan nilai kebahagiaan abadi yang ada di sorga, dan nilai ketuhanan secara terintegrasi. Saya kira nilai-nilai falsafah budaya yang sudah menasional bahkan sudah mendunia sudah saatnya kita hidupkan kembali dalam mewujudkan masyarakat yang damai. *Tepo seliro, kayuh baimbai, huma betang, adil ka' talino - bacuramin ka' saruga - basengat ka' jubata* sudah saatnya kita hidupkan, tanamkan, amalkan dan kita masukkan nilai-nilai moralitas itu ke dalam masyarakat terutama jiwa para penegak hukum kita. Dengan itu, maka tidak ada lagi banyak percekcoan dalam rumah tangga, tidak banyak lagi perkawinan instan, tidak banyak lagi keresahan dalam beribadah haji, tidak banyak lagi kaum mustahiq permanen, berkurangnya *stunting*, dan lenyapnya rentenir online dimuka bumi Indonesia.

RUJUKAN

- Abdurrahman, *Makalah Mengenal Karya Tulis Ulama Banjar: Menelusuri Karya-Karya shaikh Muhammad Arshad al-Banjari*, Banjarmasin; Juli 1988, p. 11-16.
- Agarwal, Bina. "Gender and command over property: A critical gap in economic analysis and policy in South Asia." *World development* 22.10 (1994): 1455-1478.
- Aini, Noryamin, Ariane Utomo, and Peter McDonald. "Interreligious marriage in Indonesia." *Journal of Religion and Demography* 6.1 (2019): 189-214.
- Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar, Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997).
- Alsharif, Fahad. "Undocumented migrants in Saudi Arabia: COVID-19 and amnesty reforms." *International Migration* (Geneva, Switzerland) 60.1 (2022): 188.
- Anggraeni, M, dan Suyanto Suyanto. "Ajaran tentang Bakti Istri kepada Suami dalam Serat Wulang Reh Putri." *Nusa: Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra* 12.2: 108-117.
- Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, Bandung; Mizan, 1998.
- Beal, Ty, et al. "A review of child stunting determinants in Indonesia." *Maternal & child nutrition* 14.4 (2018): e12617.
- Benthall, Jonathan. "Financial worship: The Quranic injunction to almsgiving." *Journal of the Royal Anthropological Institute* (1999): 27-42.

- Berlemann, Michael, and Robin Christmann. "Disposition time and the utilization of prior judicial decisions: Evidence from a civil law country." *International Review of Law and Economics* 62 (2020): 105887.
- Burhanuddin, Hamam. "Pendidikan Berperspektif Gender di Pesantren." *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman* 2.1 (2015): 111-132.
- Burton, Rob JF, and Gerald Schwarz. "Result-oriented agri-environmental schemes in Europe and their potential for promoting behavioural change." *Land Use Policy* 30.1 (2013): 628-641.
- Cammack, Mark. "Legal aspects of Muslim-non-Muslim marriage in Indonesia." *Muslim-non-Muslim marriage: Political and cultural contestations in Southeast Asia* (2009): 102-138.
- L
- Cheong, Calvin WH. "Risk, resilience, and Shariah-compliance." *Research in International Business and Finance* 55 (2021): 101313.
- Covey, Stephen R., and Sean Covey. *The 7 habits of highly effective people*. Simon & Schuster, 2020.
- Dainow, Joseph. "The civil law and the common law: some points of comparison." *Am. J. Comp. L.* 15 (1966): 419.
- Dakhoir, Ahmad, Ibnu Elmi AS Pelu, and Dian Ferricha. "Contextualization of the Use of Zakat in Reducing Stunting: Evidence from Indonesia." *International Journal of Entrepreneurship* 25.2 (2021).
- _____, Ibnu Elmi AS Pelu, and Dian Ferricha. "Contextualization of the Use of Zakat in Reducing Stunting: Evidence from

- Indonesia." *International Journal of Entrepreneurship* 25.2 (2021). Hal. 1.
- _____, "Al-Qardawi's Thought on Zakat of Stocks in a Modern Industry: an Experience of Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13.2 (2019): 159-168.
- _____, "Hukum syariah compliance di perbankan syariah." (2017).
- _____, "Konstruksi Hukum Pengaturan Tarif Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia." *Arena Hukum* 12.1 (2019): 136-152.
- _____, "The fatwa authorities of National syaria council of Majelis Ulama Indonesia in supporting The principle if syariah Compliance." *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 22.1 (2019).
- Darussamin, D, "Hak Harta Bersama bagi Istri yang Bekerja Perspektif Maqashid asy-Syari'ah," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 51, No.2, Desember 2017, h. 371.
- Daudi, Abu, *Maulana Shaikh Muhammad Arshad al-Banjari* (Tuan Haji Besar), (Kal-Sel, Madrasah Sullam Al-Ulum, 1996), p. 15.
- Diskusi Ahli, "Barang perpantangan: Sebuah Akomodasi Hukum Waris Islam atas Budaya Relasi Jender dalam Masyarakat Banjar," *Jurnal Kebudayaan Kandil Melintas Tradisi*, Edisi 7, Tahun II, 2004, p. 68.
- Dufva, Tomi, and Mikko Dufva. "Grasping the future of the digital society." *Futures* 107 (2019): 17-28.
- Faizal, Liky. "Harta bersama dalam Perkawinan." *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 8.2 (2015): 77-102.
- Fikriawan, Suad, Syamsul Anwar, and Misnen Ardiansyah. "The Paradigm of Progressive

- Judge's Decision and Its Contribution to Islamic Legal Reform in Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15.2 (2021): 249-262.
- Frank, Richard M. "Knowledge and Taqlîd: The foundations of religious belief in classical Ash'arism." *Journal of the American Oriental Society* (1989): 37-62.
- Friedman, Lawrence M. *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation, 1975.
- Fuller, Lon Luvois. "The morality of law." (1964).
- Grais, Wafik, and Matteo Pellegrini. *Corporate governance and Shariah compliance in institutions offering Islamic financial services*. Vol. 4054. World Bank Publications, 2006.
- Grijns, Mies, and Hoko Horii. "Child marriage in a village in West Java (Indonesia): Compromises between legal obligations and religious concerns." *Asian Journal of Law and Society* 5.2 (2018): 453-466.
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Undang-undang NO. 7 Tahun 1989*, Jakarta: Pusat Kartini, 1997.
- Hardini, Sri. "Introduction to the Law of Indonesia." *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)* 2.1 (2016): 91-100.
- Hasan, Mahsun, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2004.
- Hassan, A. *Al-Fara'id*, Surabaya; Pustaka Progressif, 2003.

- Hasyim, Syafiq, *Hal-hal Yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuan dalam Islam*, Bandung; Mizan, 2001.
- Hedi, Fathol, Abdul Ghofur Anshori, and Harun Harun. "Legal Policy of Interfaith Marriage in Indonesia." *Hasanuddin Law Review* 3.3 (2017): 263-276.
- Hoekstra, Joost. *Officium nobile, officium durum*. Amsterdam University Press, 2002.
- Horii, Hoko. "Marriage, Gender and Islam in Indonesia: Women Negotiating Informal Marriage, Divorce, and Desire, by Maria Platt." *Bijdragen tot de taal-, land-en volkenkunde/Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia* 174.2-3 (2018): 345-347.
- Huda, Anam Miftakhul, "The Identity of Javanese Women (The study of Phenomenology Toward Indonesian Migrant Women Workers)." *JARES (Journal of Academic Research and Sciences)* 1.1 (2016): 61-72.
- Imam Jalaluddin Abdurrohman As-Suyuti. Al-Asybah Wan Nadho'ir Lis Suyuthi. Maktabah Nazzar Al-Baz: Mekah, Riyadh, Arab Saudi. 1997.
- Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Isteri di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Jumadi, "Institusi Sara' di Maros Sulawesi Selatan." *Attoriolong Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Penelitian Kesejarahan* 7.2 (2010): 1-104.
- Kieff, F. Scott, "Property rights and property rules for commercializing inventions." *Minn. L. Rev.* 85 (2000): 697.
- Klaus Schwab, *The fourth industrial revolution*. Currency, New York, Crown Publishing 2017.

- Kompas, "PDB naik", dalam <https://money.kompas.com/read/2019/10/21/050900326/2045-jokowi-ingin-pdb-indonesia-7-triliun-dollar-as-dan-masuk-5-ekonomi-besar>
- Kompas, dalam <https://money.kompas.com/read/2022/05/26/113036426/terbaru-ini-daftar-100-pinjol-ilegal-2022-yang-ditutup-ojk>. Di akses tanggal 1 juli 2022.
- Kramer, Matthew H. "Where law and morality meet." (2008).
- Kultsum, Fidya Faridah, and Erlina Wiyanarti. "Dinamika Inggris Dan Uni Eropa: Integrasi Hingga Brexit." *Factum: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah* 7.2 (2018): 163-174.
- M.S. Kadir, Shaikh Muhammad Arshad al-Banjari *Pelopor Da'wah Islam di Kalimantan Selatan*, Mimbar Ulama, 6; 1976, p. 69.
- Marpaung, Aripin. "Zakat Regulation as a Reduction of Income Tax in Indonesia." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* Vol 3.3 (2020): 2109-2116.
- Maspeke, A.S, dan Akhmad Khisni. "Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Fiqih dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12.2 (2017): 173-184.
- Muneeza, Aishath, et al. "A comparative study of hajj fund management institutions in Malaysia, Indonesia and Maldives." *International Journal of Management and Applied Research* 5.3 (2018): 120-134.
- Nisa, Eva F. "The bureaucratization of Muslim marriage in Indonesia." *Journal of Law and Religion* 33.2 (2018): 291-309.

- Nur Khoirin Yd, *Marriage Treasure Ownership in Arabic and Nusantara Fiqh Perspectives*, ADDIN, Volume 12, Number 2, Agustus 2018, p. 567.
- Nur Mazidah, "Relijiusitas dan Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Industri." *Jurnal Sosiologi Islam* 1.1 (2011). p. 54.
- Nurcholish, Ahmad. *Interfaith marriage in the constitution and the Islamic law dynamics in Indonesia*. Universitas Islam Indonesia, 2015.
- O'shaughnessy, Kate. *Gender, state and social power in contemporary Indonesia: Divorce and marriage law*. Routledge, 2009.
- Pantas, Pribawa. "Zakat Effects on Mustahiq Happiness." *2019 Ahmad Dahlan International Conference Series on Education & Learning, Social Science & Humanities (ADICS-ELSSH 2019)*. Atlantis Press, 2019.
- Pawson, Ray. *Evidence-based policy: a realist perspective*. sage, 2006.
- Pelu, Ibnu Elmi AS, and Ahmad Dakhoir. "Marital Property within the Marriage Law: A Debate on Legal Position and Actual Applications." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 59.2 (2021): 287-316.
- Rayyan, S, and Erwin Hari Sentoso. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal." *Pakuan Justice Journal Of Law* 1.1 (2020): 47-61.
- Razy, Fakhruddin Al, Tafsir al Kabir aw Mafatihul Ghaib, Juz XXXIII, TT, Tanpa Penerbit. Hal. 629.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

- Rusfi, Muhammad, "Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta." *AL-'ADALAH* 13.2 (2016): 239-258.
- Sitepu, Anwar. "Fenomena Rentenir: Studi Eksploratori di Kabupaten Bekasi dan Sekitarnya." *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* 10.1 (2020): 55-73.
- Spires, Anthony J. "Regulation as political control: China's first charity law and its implications for civil society." *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly* 49.3 (2020): 571-588.
- Suhasti, Ermi, Siti Djazimah, and Hartini Hartini. "Polemics on Interfaith Marriage in Indonesia between Rules and Practices." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 56.2 (2018): 367-394.
- T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Triansyah, Abdurrazzaq, et al. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Ilegal (Studi Kasus Pinjol Ilegal di Yogyakarta)." *Cross-border* 5.2 (2022): 1090-1104.
- TvOne, "Menikah dengan kambing," dalam <https://www.tvonenews.com/daerah/jatim/46216-fakta-menarik-manusia-menikah-dengan-kambing-di-gresik-melibatkan-anggota-dprd-berujung-taubat>. Di akses tanggal 1 juli 2022.
- Usman, Gazali, *Kerajaan Banjar: Sejarah Perkembangan Politik, Ekonomi Perdagangan dan Agama Islam*, (Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, 1994).

Widyastari, Dyah Anantalia, et al. "Marital Dissolution in Postmodern Java, Indonesia: Does Early Marriage Increase the Likelihood to Divorce?." *Journal of Divorce & Remarriage* 61.8 (2020): 556-573.

World Bank, *Level of Participation of the Female Labor Force in ASEAN Ages Over 15 Years*, New York, 2019.

Young, Ken, et al. "Social science and the evidence-based policy movement." *Social policy and society* 1.3 (2002): 215-224.

Zale, Kellen, *Sharing Property*, University of Colorado Law Review, 2016.

Zuhdi, Muhammad, "Challenging Moderate Muslims: Indonesia's Muslim Schools in the Midst of Religious Conservatism," *Religions*, 2018, 9, 310; doi:10.3390/rel9100310.

WASIAT KEBAIKAN

Melalui pengukuhan ini, izinkan saya menyampaikan pesan kepada diri dan jiwa saya sendiri, kepada seluruh pecinta ilmu pengetahuan, kepada para dosen muda, terutama khususnya kepada adik-adik mahasiswa-mahasiswi dimanapun berada. Mempelajari ilmu pengetahuan memerlukan 2 instrumen dalam jiwa manusia. Instrumen *himmah* dan *azimah*. Belajar tanpa *himmah*, hanya akan menghasilkan manusia yang pintar namun ambisius (*ghadhabiyah*), belajar tanpa *azimah*, hanya akan melahirkan manusia yang pintar namun binal (*syahwatiyah*). Hanya *himmah* dan *azimah* yang kuat yang dapat “**merebut**” ilmu pengetahuan dari Tuhan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Melalui pengukuhan ini pula, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan semangat dan bantuan sehingga saya dapat mencapai jabatan akademik sebagai Guru Besar. Ucapan terima kasih yang pertama saya sampaikan kepada Bapak Nadiem Makarim Menteri Pendidikan Nasional melalui Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 66073/MPK.A/KP.05.01/2021, tanggal 28 september 2021 tentang Kenaikan Jabatan Akademik/Fungsional, sebagai dasar hukum kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk menerima tanggung jawab sebagai Guru Besar bidang Hukum Perdata Islam.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Profesor Ibnu Elmi saat tahun 2018 telah memberikan kesempatan kepada saya mengajukan Guru Besar tahun 2018, dan memberikan persetujuan pengusulan saya sebagai Guru Besar. Kurang lebih 4 tahun sejak usul, dan baru tahun 2021, Allah izinkan

SK guru besar turun dan lahir ke dunia. Terimakasih juga saya sampaikan kepada Rektor IAIN palangka raya bapak Dr H Khairil Anwar dan Ketua senat beserta anggota senat IAIN Palangka Raya yang pada hari ini mengukuhkan kami.

Ucapan saya ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada guru-guru saya, Kyahi mashadi bin KH dimiyati pengasuh pesantren Thoriqusaadah catur kuala Kapuas yang telah memberi nama saya, Tajul arifin syaikh KH Anang Ramli HAQ pesantren ubudiyah Bati-bati yang mengajarkan ilmu tentang keyaqinan, KH mushoddi Fikri bin KH Faruq Muhammad putra Nyai Zainab Siddiq binti KH Ahmad Siddiq Jember pengasuh pesantren Riyadushalihin Jember, Dr H sutrisno (promotor skripsi), Prof Dr KH Ridwan Nasir Promotor S2 UIN sunan ampel Surabaya, dan seluruh Promotor disertasi, Bapak Prof. Dr. KH. Thohir Luth MA, Prof Masruchin dan Prof Dr Rahmat Syafaat SH MH saat kuliah S3 di Universitas Brawijaya Malang yang telah menumbuhkan keyakinan kepada saya kalau suatu saat nanti saya akan dapat mencapai jenjang derajat ilmu alah satunya Guru Besar ini.

Terimakasih juga saya sampaikan kepada almamater saya yang hari ini hadir Prof Dr H Babun Suharto Rektor UIN KHAS Jember yang saat ini juga berkenan hadir yang telah menetapkan saya sebagai wisudawan terbaik saat kuliah di STAIN Jember saat itu. Sesuai petuah bapak Profesor Babun Suharto, lulus dari sini harus banyak memberi manfaat kepada ummat, dan harus banyak berprestasi. Atas dorongan itu, berdirinya saya hari ini di podium ini, dalam rangka membuktikan salah satu prestasi itu Prof. mohon bimbingan agar terus dapat berprestasi lebih baik lagi ke depan.

Rasa terimakasih juga saya sampaikan kepada almamater saya yang hari tepat di hadiri oleh Prof Dr KH Nur Syam, beliau sebelum menjabat sebagai sekjend kementerian agama RI tahun 2014-2018, beliau adalah rector UIN Sunan Ampel Surabaya. Saat itu, ayahanda Prof Nur Syam yang memberikan oleh-oleh kepada saya, yatu piagama penghargaan sebagai wisudawan S2 terbaik saat itu. Dalam sambutan saat itu, beliau juga berpesan agar alumni mampu membangun peran yang bermanfaat, membangun karakter dan membangun jaringan yang luas. Hari ini di

hadapan ayahanda Prof Nur Syam, saya telah mengambil peran itu dan membuktikan pesan-pesan ayahanda Prof Nur Syam. Sampai hari ini, saya tidak bosan berdakwah menyampaikan risalah Rasulullah baik di dalam kampus, maupun di tengah masyarakat hingga ke pedalaman-pedalaman di Kalimantan ini. Tidak hanya itu, dakwah-dakwah kebaikan melalui lisan dan tulisan ilmu pengetahuan, forum akademik, konferensi seminar baik di dalam negeri maupun di luar negeri seperti Chiba University Jepang tahun 2016, Vrije Universiteit Amsterdam 2017, Leiden University Netherlands 2017, Lions University Perancis 2018, Durham University UK 2018, Fattani University Thailand tahun 2018, dan King Abdul University Jeddah 2018, juga menjadi jejak garapan dakwah yang tidak akan saya hentikan. Inilah persembahan kiprah kami sebagai salah satu alumni kampus terbaik di Indonesia UIN Sunan Ampel Surabaya.

Ucapan terima kasih penuh semangat kepada Tim Peneliti dan Penulis Guru 18 yang memiliki semangat luar biasa, Bapak Prof. Dr. Ibnu Elmi AS Pelu SH MH., Candidat Doktor Jefry Tarantang, S.Sy., S.H., M.H., C. Me, Candidat Doktor Wahyu Akbar, S.

E.Sy., M.E., Saudara Rahmad Kurniawan, S. E.Sy., M.E., dan para kolega yang tak kenal lelah memberi semangat dan dukungan.

Rasa terima kasih yang tidak terhingga saya sampaikan kepada istri tercinta Ika Nurhartanti, S.Kep, atas segala doa, pengorbanan, kesabaran, dan pengertian untuk mencapai jenjang fungsional akademik Guru Besar ini. Untuk ketiga anak saya tercinta yang pertama Nurin Almadina yang saat ini mondok di pesantren Darul Ilmi Banjar Baru Kalimantan Selatan, anak ke tiga saya Ilzam Sam'uni 'Indallah yang masih berusia 1,5 tahun, dan anak kedua saya mohon berdiri nak (Namanya Prof. Dr. Bilhaq Ahmad Balya) yang masih di duduk kelas dua Madrasah Ibtidaiyah Al-Jihad Kota Palangka Raya, yang sejak kecil hidup dalam kesederhanaan namun tetap memberikan motivasi dan menjaga semangat dalam meraih Guru Besar ayahnya.

Kepada yang terhormat dan terkasih, Ibu saya dan Almarhum ayah (Khoirul Anam (Alm), serta saudara-saudara kandung saya yang senantiasa mendoakan saya, berjuta-juta katapun yang saya

ucapkan tidak akan cukup untuk mewakili ungkapkan rasa terima kasih sejak saya lahir, tumbuh berkembang, berkehidupan dan berkarya sampai akhir hayat.

Pada akhirnya kepada semua pihak yang tidak dapat saya tuliskan satu persatu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih yang setulusnya atas semua yang telah saya terima selama ini dan yang pasti hanya Tuhan yang akan membalasnya.

Demikian pidato pengukuhan Profesor dalam Bidang Hukum Perdata Islam disampaikan dalam rapat terbuka senat Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, semoga Allah SWT selalu melindungi kita semua. *Wallahul muwaffiq ila aqwamit-thariiq, Wassalamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokatuh.*

BIODATA

Nama : **Prof. Dr. Ahmad
Dakhoir, SHI, MHI**

Tempat dan Tanggal Lahir : Terusan Tengah, 07
Juli 1982

N I P : 198207072006041003

ID Scopus : 57207936052

Pekerjaan : Dosen Pascasarjana
IAIN Palangka Raya

Pangkat/Golongan : Guru Besar Hukum
Perdata Islam / IVb

Jabatan :

- 1). Staf LP3M IAINPalangka Raya 2007-2008
- 2). Sekrataris PKBH IAIN Palangka Raya 2010-2012
- 3). Wakil Dekan I FEBI Masa Bhakti 2015-2019

Jabatan Tambahan :

- 1). Mustasyar PCNU Palangka Raya 2021-2025
- 2). Dewan Riset Daerah Prov kalteng 2019-2022
- 3). ICMI Kalteng 2022
- 4). Pengurus Ikatan Cendikiawan PATRI RI 2019-2022

Alamat Kantor : Jl. G. Obos Kampus
IAIN Palangka Raya

Alamat Rumah : Jl. G. Obos VI No. 86
Palangka Raya-
Kalimantan Tengah

Pendidikan :

- 1). SDN tamban luar VII Catur Kapuas Kalteng
1994
- 2). Pondok Pesantren Thariqussa'adah Catur
Kapuas Kalteng 1991-1994 di bawah asuhan
KH Mashadi bin KH Dimiyati
- 3). MTs. Darussalam Catur Kapuas 1994-1995
- 4). MTs. Ubudiyah Bati-bati Tanah Laut Kalsel
1995-1998
- 5). MA. Ibudiyah Bati-Bati Tanah laut Kalsel 1998-
2001
- 6). Pondok Pesantren Ubudiyah Bati-bati Tanah
laut Kalsel 1995-2001 di bawah asuhan KH.
Anang Ramli HAQ bin KH Abdul Qodir
- 7). S1 Syariah UIN KH.Ahmad Shiddiq Jember
2005
- 8). Pondok Pesantren Riyadussholihin Jember
2001-2005 di bawah asuhan KH Mushoddiq

- Figri bin KH Faruq Muhammad putra Nyai
Zainab Shiddiq binti KH. Ahmad Shiddiq Jember
- 9). S2 Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya 2008-
2010
- 10). S3 Ilmu Hukum Minat Kekhususan Hukum
Ekonomi syariah Universitas Brawijaya Malang
Tahun 2012-2014

No Hp : 085215989295
Email : ahmad.dakhoir@iain-
palangkaraya.ac.id

Ayah/Ibu : Khoirul Anam (alm) /

Susripah

Istri : Ika Nurhartanti S,Kep

Anak-anak : Nurin Almadina, Bilhaq

Ahmad Balya,

Ilzam Sam'uni Indallah

Penghargaan:

Peraih Best paper award dalam Annual conference on
Islamic Studies (AICIS) 2015

Peraih Best paper award dalam Internatinal
Conference on Islamic Economics and Finence oleh
IRTI 2016

Peraih Best New Feuter award dalam International Monetary Fund IMF – WBG oleh Direktur Bank Dunia tahun 2018

Peraih Best paper award dalam NC-DPR RI 2019

Kegiatan Internasional

Guest lecturer di Chiba University Jepang 2016

Guest lecturer di Vrije University Netherlands 2016

Cross lecturer di Lyon University Perancis 2017

Presenter international di King Abdul University Jeddah 2018

Cross lecturer di Fattani University Thailand 2017 dan 2018

Guest lecturer di Durham University 2018

Publikasi dan Riset

Reviewer Journal Contemporary Islam SJR Q1-Scopus

Reviewer Journal Kasetsart SJR Q2 - Scopus

Reviewer Journal JLERI SJR Q2 – Scopus

Penulis Buku/Artikel

Hukum perbankan syariah, A Dakhoir, Aswaja Pressindo 2018
Aspek-aspek hukum bisnis: pengertian, asas, teori dan praktik, A Dakhoir, Aswaja Pressindo
Hukum zakat: pengaturan & integrasi kelembagaan pengelolaan zakat dengan fungsi lembaga perbankan A Dakhoir, Aswaja Pressindo
Hukum Zakat, A Dakhoir, Aswaja Pressindo
Ekonomi Islam dan Mekanisme Pasar, A Dakhoir, IT Aviva, Aswaja
Ekonomi Islam dan mekanisme pasar: refleksi pemikiran Ibnu Taymiyah, A Dakhoir, IY Aviva, LaksBang PRESindo
Eksistensi Usaha Kecil Menengah dan Pasar Tradisional dalam Kebijakan Pengembangan Pasar Modern, A Dakhoir, Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat 14 (1), 31-41
Manajemen zakat (Hakikat dan spirit Alquran Surah At-Taubah [9]: 103), W Akbar, J Tarantang, A Dakhoir, K-Media
Gagasan, tatanan dan penerapan ekonomi syariah dalam perspektif politik hukum, IEAS Pelu, Setara Press
Pemikiran Fiqih Shaikh Muhammad Arshad Al-Banjari, A Dakhoir, Islamica: Jurnal Studi Keislaman 4 (2), 230-247

Advokat mulia (Paradigma hukum profetik dalam penyelesaian sengketa hukum, A. Dakhoir, J Tarantang, K-Media

Penegakan hukum pers, A Dakhoir, Aswaja Pressindo

Hukum Syariah Compliance di Perbankan Syariah, A Dakhoir, K-Media Yogyakarta

Manajemen Dana Iuran Rukun Kematian di Puntun Kota Palangka Raya, J Jirhanuddin, A Dakhoir, S Sulistyaningsih, JURNAL AL-QARDH 1 (2)

The construction of law of institutional the management of zakat through functions of islamic banking in perspective maqasid al-sharia, A Dakhoir, T Luth, M Ruba, R Syafa, International Journal of Education and Research 2 (5), 89-98

Bank Zakat (Gagasan, Tatahan dan Penerapan Pengelolaan Zakat Terintegrasi), A Dakhoir, Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 9 (1), 141-154

The Fatwa Authorities of National Syaria Council of Majelis Ulama Indonesia in Supporting the Principle of Syariah Compliance, A Dakhoir, Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues 2 (Print ISSN: 1544-003

Bank of Alms (Zakat): Ideas, structure, and the implementation of the integrated Alms management, A Dakhoir, European Journal of Economic, Finance and Administrative sciences 75, 59-70

Jual beli barter dalam perspektif ekonomi syariah (studi

pada masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau), U Riyanti, A Dakhoir, IAIN Palangka Raya
Hukum bunga bank (pendekatan fikih washiyah iqtishadiyah), A Dakhoir, J Tarantang K-Media
Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam di Indonesia, A. Dakhoir, IEAS Pelu, J Tarantang, Al Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 14 (2), 307-316
Al-Qardawi's Thought on Zakat of Stocks in a Modern Industry: an Experience of Indonesia, A Dakhoir, Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 13 (2), 159-168
Indonesia Tuan Rumah Annual Meeting IMF 2018, A Dakhoir, Selamat Datang di Pusat Halal Dunia." Tribun Kalteng. com. https://kalteng ...
Poligami dan Power Ekonomi, A Dakhoir, JURNAL AL-QARDH 1 (1)
Etika bisnis pedagang ikan di Pasar Besar Kota Palangka Raya perspektif ekonomi Islam, N Rusdiana, A Dakhoir, IAIN Palangka Raya
Pemikiran Iwan Triuwono tentang akuntansi kelembagaan ekonomi syariah, A Norain, A Dakhoir, IAIN Palangka Raya
Konstruksi Hukum Pengaturan Kelembagaan Pengelolaan Zakat Terintegrasi dalam Fungsi Sosial Perbankan

Syariah, A Dakhoir, Universitas Brawijaya

Reactualization of the Islamic social finance system of Saprah Amal in Banjar community, Indonesia, A Dakhoir, Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues 21

Integrated Control Management on Halal-Thayyib of Food Towards Street Food in Indonesia, A Dakhoir, International Journal of Management and Administrative Sciences (IJMAS) 6

Akuntansi Kelembagaan Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Iwan Triuwono, R Rahmانيar, A Dakhoir, JURNAL AL-QARDH 2 (1), 42-52

Penyuluhan Urgensi Tera Ukur/Sertifikasi Timbangan di Pasar Kahayan Kota Palangka Raya, R Kurniawan, J Tarantang, W Akbar, A Dakhoir, NA Safitri, PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 2 (1), 128-133

Web Based Assessment Alternative for Arabic Online Exam, A Dakhoir
Journal of Arabic Language Teaching, Linguistics, and Literature 2

Spirit Filantropi Islam dalam Aktivitas Sosial di Masa Pandemi Covid-19, M Erfan, A Dakhoir, M Mazrur, OIKONOMIKA: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah 2 (2), 55-66

Contextualization of the Use of Zakat in Reducing Stunting: Evidence from Indonesia, A Dakhoir, IEAS Pelu, D Ferricha, International Journal of Entrepreneurship 25 (2)

Musyawarah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama: Avidence Based Solution From Indonesia, AK Rizani, A Dakhoir, El-Mashlahah 10 (2), 52-64
Developing sharia tourism in fostering regional economic growth (study on sharia tourism at west nusa tenggara), A. Dakhoir, IEAS Pelu, W Akbar, Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature
Pariwisata syariah pengembangan wisata halal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, A. Dakhoir, IEAS Pelu, R Kurniawan, W Akbar K-Media
Hukum Wakaf Pakaian, A Dakhoir, K-Media Yogyakarta
Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam), A Dakhoir, K-Media Yogyakarta
A Green Banking for Sustainable Development in Sharia Banking H Setiawan, D Erawati, A Dakhoir, Luqman, the Annual Conference on Social Sciences and Humanities (ANCOSH 2018)) 1, 82-86
Budaya kerja petani transmigran di Pangkoh IX Kabupaten Pulang Pisau dalam meningkatkan taraf hidup, J Susanto, A Dakhoir, IAIN Palangka Raya
The rise of sharia enterprise: a new model of the form of Islamic financial institutional law in Indonesia, A Dakhoir, Istiqro 15 (01), 89-118

Antinomi Hukum Sistem Kelembagaan Pengelolaan Zakat di Indonesia, A Dakhoir, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat 11 (163), 1-22

Bankers'attitudes To The Legal Position Of Bank Interest: New Insights For The Development Of Fiqh Wasatiyah Maliyah, A Dakhoir, J Tarantang, G Rahman, Akademika: Jurnal Pemikiran Islam 27 (1), 47-60

It-Based Training Of Trainer (Tot) Zakat And Wakf Management Training/Application For Zakat Collection Units (Upz) City Of Palangka Raya, A Hasan, R Kurniawan, A Dakhoir, JSAAM Putra, NNA Astiti, AMALA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1 (1), 1-11

The Combination of Legal System: reconciliation of divorce cases in Dayak Ngaju customary law and positive Law systems, IEAS Pelu, A Dakhoir, G Lisanawati, J Tarantang, Jurnal Akta 9 (1), 1-13

Analisis Syariah Compliance Pengajuan Komplain Di Bukalapak, M Erfan, A Dakhoir, M Mazrur, Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah 3 (2), 99-115

Marital Property within the Marriage Law: A Debate on Legal Position and Actual Applications, IEAS Pelu, A Dakhoir, Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies 59 (2), 287-316

Virginitas dalam sistem pencatatan perkawinan (pendekatan multiparadigma), g rahman, a dakhoir, jurnal riset kajian teknologi dan lingkungan 4 (1), 247-257

The Concept of "Martabat Tujuh" Al-Burhanpuri (Study of

the Creation of the Universe in the Perspective of Philosophical Sufism), F Rahman, A Dakhoir, International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding 8 (7 ...
Nalar Fidyah (Telaah Maqasid Al-Syariah Al-Iqtishadiyah) J Tarantang, A Dakhoir, ABN Ahmad, Jurnal Transformatif (Islamic Studies) 5 (1), 13-30
Contextualization of the Use of Zakat in Reducing Stunting: Evidence from Indonesia, A. Dakhoir, Ibnu Elmi AS. Pelu, Ferricha, D., International Journal of Entrepreneurship 2 (Volume 25), 1-12
Analisis strategi promosi tabungan faedah pt. Bri syariah kc. Banjarmasin, N Habibah, A Dakhoir, Finansha: Journal of Sharia Financial Management 1 (2), 63-72
Konstruksi Hukum Pengaturan Tarif Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia, A Dakhoir, Arena Hukum 12 (1), 136-152
The Role of Ijtihad and the Development of Sharia Financial Technology Products in Indonesia, IEAS Pelu, A Dakhoir
Manajemen Zakat (Hakikat dan Spirit Al-Quran Surah At-Taubah [9]: 103), A Dakhoir, K-Media Yogyakarta
Spirit of Alms In The Quran; Legal Hermeneutics Approach, A Dakhoir, Journal Of Humanities And Social Science (IOSR - JHSS) 23 (9), 82 – 91
Bank Zakat, A Dakhoir, K-Media

Impor Beras Dalam Kebijakan Hukum Ekonomi Islam: Keinginan Atau Kebutuhan, A Dakhoir, NA Safitri, K Khoiriyah, JURNAL AL-QARDH 3 (2), 123-131
Kebijakan Hukum Pengembangan Ekonomi dan Industri Keuangan Syariah, A Dakhoir, PROCEEDING International Islamic Research Forum (IIRF) 2017, 1-226
Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang di Kalangan Masyarakat Talohen Huku Kelurahan Ampah Kota, Kabupaten Barito Timur, S Syarifuddin, A Dakhoir, SDN Azizah, JURNAL AL-QARDH 1 (2)
Proceeding international islamic research forum: kebijakan hukum pengembangan ekonomi dan industri keuangan syariah, A Dakhoir, IAIN Palangka Raya
Mekanisme penyelesaian sengketa perbankan Islam di Malaysia dan indonesia, S Syaikh, A Dakhoir, T Hidayati, MA Hussain, FM Noor, IAIN Palangka Raya
The contruction of law institution the management of zakat through functions of Islamic banking in perperspective maqasid A-Sharia, A Dakhoir, European Journal of Social Sciences 51 (2), 171-182
Menuju Kholilullah, A. Dakhoir, Aswaja Pressindo 1, 263-273
Teknologi Stem Cell dalam perspektif masalah, A Dakhoir, Jurnal el-Maslahah, 34-51

Penerapan alasan dan Prosedur Poligami dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia (Studi Penerapan Alasan dan Prosedur Poligami di Surabaya, A Dakhoir, Surabaya: IAIN Sunan Ampel. Tesis.



**PENGURUS WILAYAH
NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



**PIMPINAN WILAYAH
IKATAN SARJANA NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PALANGKA RAYA
KALIMANTAN TENGAH – INDONESIA
<https://iain-palangkaraya.ac.id>

